

**KAJIAN ATAS PERAN PEMERINTAH TERKAIT RELASI ANTAR WARGA
PASCA KONFLIK PEMEKARAN KABUPATEN MAMASA MELALUI
PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PERDAMAIAN YANG BERKELANJUTAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Filsafat pada
Program Studi Filsafat Keilahian Program Magister Universitas Kristen Duta Wacana



OLEH:

FERDY HIDAYAT

Nim: 50220126

Dosen Pembimbing Tesis

- 1. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D**
- 2. Dr. -Ing. Ir. Paulus Bawole, MIP**

**PROGRAM STUDI FILSAFAT KEILAHIAN PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

Yogyakarta

2024

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdy Hidayat
NIM : 50220126
Program Studi : Magister Filsafat Keilahian
Fakultas : Teologi
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Kajian Atas Peran Pemerintah Terkait Relasi Antar Warga Pasca Konflik Pemekaran
Kabupaten Mamasa Melalui Perspektif Pembangunan Perdamaian Yang
Berkelanjutan**

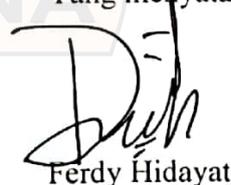
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 11 Agustus 2024

Yang menyatakan



Ferdy Hidayat

NIM: 50220126

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

**KAJIAN ATAS PERAN PEMERINTAH TERKAIT RELASI ANTAR WARGA
PASCA KONFLIK PEMEKARAN KABUPATEN MAMASA MELALUI
PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PERDAMAIAN YANG BERKELANJUTAN**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

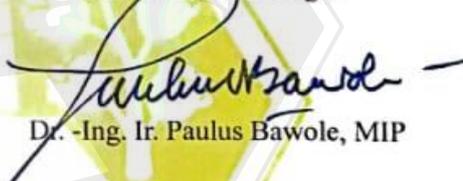
Ferdy Hidayat
(NIM: 50220126)

dalam ujian tesis Program Studi Magister Filsafat Keilahan
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana
pada tanggal 8 Agustus 2024 dan dinyatakan LULUS

Dosen Pembimbing 1

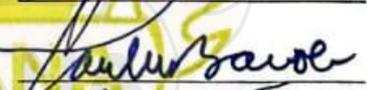

Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D.

Dosen Pembimbing 2


Dr. -Ing. Ir. Paulus Bawole, MIP

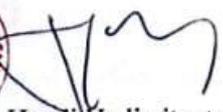
Dosen Penguji:

1. Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M.Hum., Ph.D.
2. Dr. -Ing. Ir. Paulus Bawole, MIP
3. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D.


Disahkan oleh:




Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D.

Kaprodi Filsafat Keilahan Program Magister

PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah karya saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam tesis ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Jika kemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan ini, maka saya bersedia melepaskan gelar magister saya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2024



Ferdy Hidayat



KATA PENGANTAR

“Tindakan apa yang dapat kita lakukan? Pertanyaan tersebut merupakan inti dari Studi Perdamaian”

Johan Galtung

“Bukan persoalan seberapa banyak seseorang mempraktikkan suatu tindakan, tapi seberapa intensifnya ia mempraktikkannya bersama-sama dengan yang lain”

Paulus S. Widjaja

Syukur yang tak henti-hentinya kepada Tuhan Yesus Kristus, atas limpahan kasih dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis dengan judul **“Kajian Atas Peran Pemerintah Terkait Relasi Antar Warga Pasca Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa Melalui Perspektif Pembangunan Perdamaian Yang Berkelanjutan”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Filsafat pada Minat Studi Kajian Konflik Perdamaian, Program Studi Filsafat Keilahian, Program Magister, Universitas Kristen Duta Wacana.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D** dan Bapak **Dr. -Ing. Ir. Paulus Bawole, MIP** selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar dan pengertian telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan memotivasi penulis, selama proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Penulis mengakui bahwa ada banyak kelemahan dari penulis terutama dalam berkomunikasi dengan kedua pembimbing, namun karena kesabaran dan kearifan kedua dosen pembimbing dalam menjawab setiap pertanyaan dan memberikan solusi, tesis ini dapat diselesaikan sekaligus mengembangkan kemampuan akademik dan penelitian penulis.
2. Bapak **Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M.Hum., Ph.D** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis, agar tesis menjadi lebih baik. Penulis sangat menghargai perhatian dan keilmuan yang Bapak berikan dalam proses ujian, baik dalam tahap ujian proposal tesis hingga hingga ujian tesis.
3. Segenap dosen Program Magister Filsafat Keilahian UKDW yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan, serta karyawan Program Magister Filsafat Keilahian UKDW yang membantu urusan-urusan administrasi.
4. **Yayasan Surya Edukasi Bangsa** yang telah menyediakan dan memberikan Beasiswa *Online Scholarship Competition* (OSC 2022) bagi penulis. Dukungan finansial yang

diberikan sangat membantu penulis untuk fokus dalam belajar dan menyelesaikan penelitian ini. Tanpa dukungan ini, pencapaian akademik penulis mungkin tidak akan tercapai dengan sebaik ini. Kepercayaan dan kesempatan yang diberikan, telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan semoga penulis dapat terus berkarya serta memberikan kontribusi yang berarti di masa depan.

5. Bapak (**Pelipus**), Mamak (**Lempan Sari**), Adik (**Putri**), Istri Tercinta (**Yuyun Mairevis**) yang selalu mendoakan dan mendukung penulis selama proses studi di UKDW. Terima kasih atas cinta dan pengorbanan yang tiada henti, karena tanpa itu semua penulis tidak akan mampu mencapai titik ini. Segala pencapaian penulis adalah hasil dari didikan dan pengorbanan yang Bapak dan Mamak berikan. Begitu juga dengan Istri terkasih, dengan kesabaran, pengertian, dan dukungan yang telah ia berikan selama penulis menyelesaikan tesis ini. Kehadirannya dalam setiap momen telah memberikan kekuatan dan semangat yang tak tergantikan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, serta selalu memberikan semangat ketika penulis menghadapi tantangan dalam penulisan. Singkatnya, seluruh proses akademik yang telah penulis lalui tidak akan berjalan dengan baik jika tanpa dukungan cinta dari kalian semua.
6. Kawan-kawan seangkatan, M.Fil 2022 dan M.Div 2021, yang selalu memberikan semangat, terutama ketika penulis menghadapi berbagai tantangan akademik di kampus UKDW dan aktivitas sehari-hari lainnya di Yogyakarta. Secara khusus, penulis sampaikan terimakasih kepada **Keluarga DUNHIL** (Pak Lie, Pak Wayan, dan Eikel) serta Yuda, atas diskusi-diskusi berharga yang kerap kali memberikan pencerahan, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Kalian telah menjadi teman sekaligus keluarga selama menempuh perjalanan akademik ini. Kebersamaan kita, baik dalam suka maupun duka, telah memperkaya pengalaman belajar dan hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian mengenai konflik dan perdamaian di Indonesia, serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, Agustus 2024

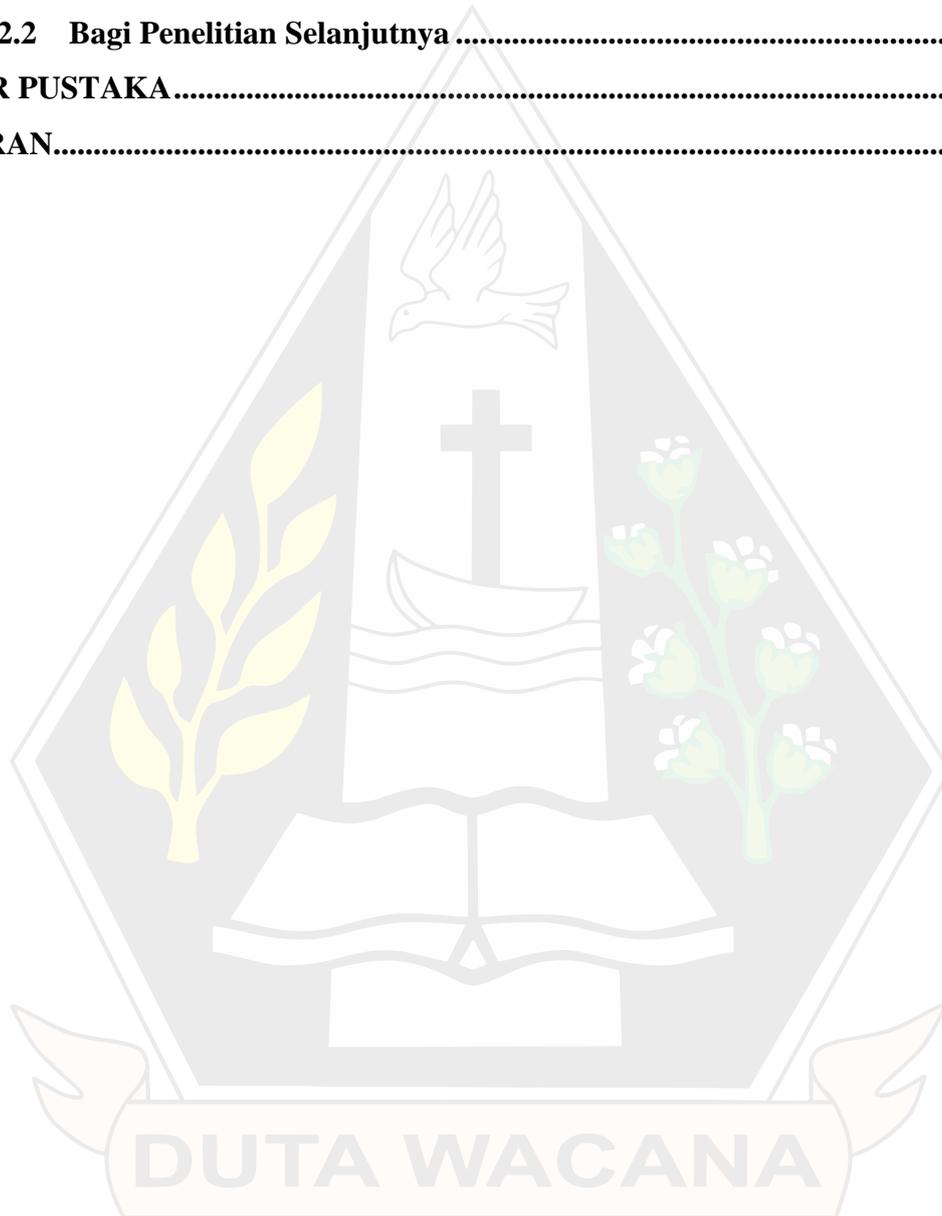
Ferdy Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Konteks Konflik dan Kekerasan	2
1.1.2 Tata Kelola Konflik dan Implikasinya.....	5
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Kerangka Teori	10
1.5.1 Desain Pembangunan Perdamaian.....	11
1.5.2 Integrasi Perdamaian dan Pembangunan	12
1.5.3 Penggunaan Kerangka Teori	13
1.6 Metodologi Penelitian	14
1.6.1 Jenis Penelitian	14
1.6.2 Pengumpulan Data.....	15
1.6.3 Analisis Data	15
1.6.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	16
1.7 Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM KELUARGA <i>MASSEBAMBANGAM</i> DAN MASYARAKAT ARALLE-MAMBI.....	18
2.1 Kependudukan dan Kondisi Geografis.....	18
2.2 Kesejahteraan Masyarakat	19
2.2.1 Ekonomi	20
2.2.2 Pendidikan	22
2.3 Sosial Budaya.....	24

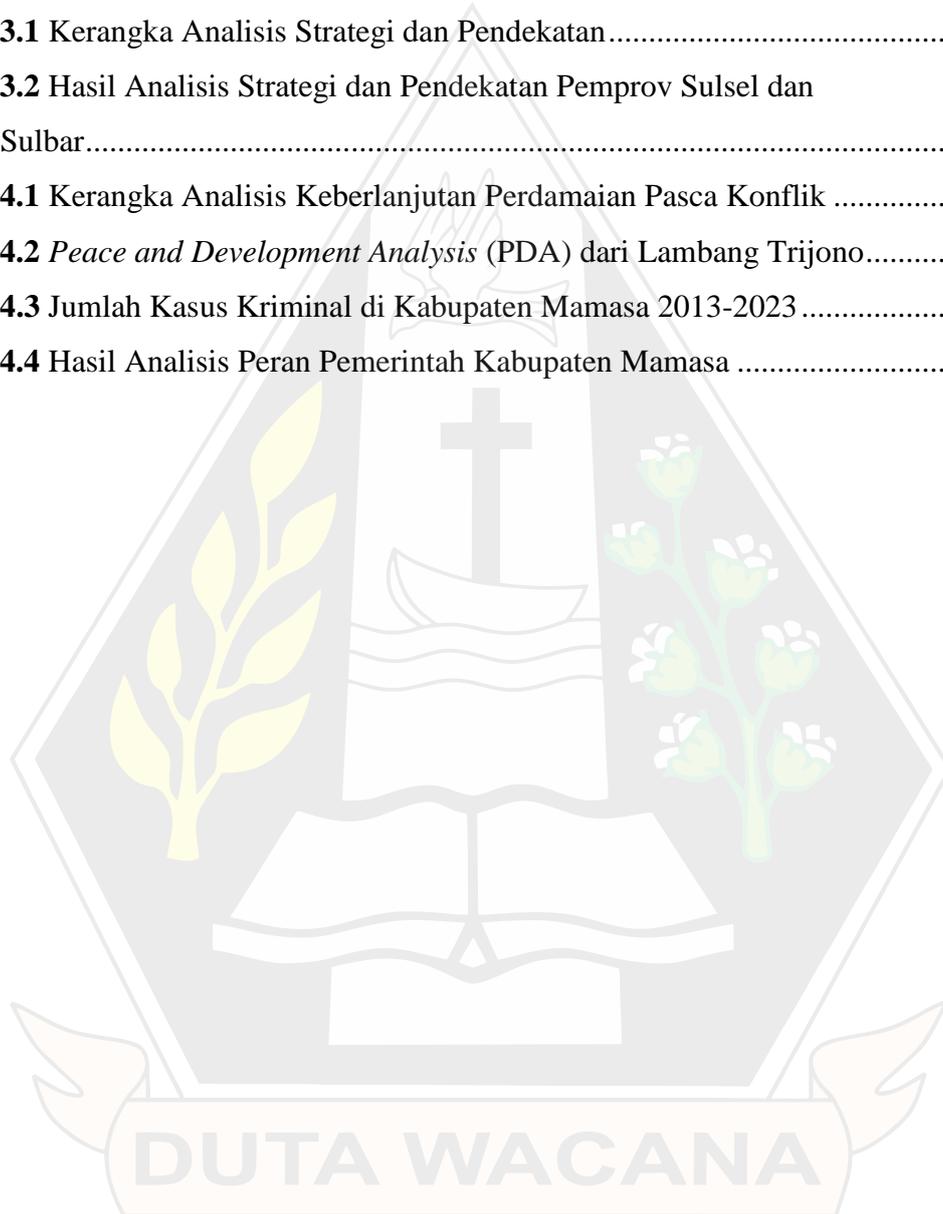
2.3.1	Sejarah Leuhur	24
2.3.2	Terbentuknya Persekutuan <i>Pitu Ulunna Salu</i> (PUS)	26
2.3.3	Bahasa	29
2.3.4	Agama dan Kepercayaan.....	31
2.4	Pemerintahan di PUS dan Mamasa.....	33
2.5	Dinamika Hubungan Keluarga <i>Massebambangam</i> dan Masyarakat Aralle-Mambi	36
2.6	Rangkuman.....	40
BAB III ANALISIS STRATEGI DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN		
PERDAMAIAN KONFLIK PEMEKARAN KABUPATEN MAMASA		42
3.1	Teori Strategi dan Pendekatan Pembangunan Perdamaian	42
3.2	Proses Pembangunan Perdamaian Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa	45
3.2.1	Strategi Perdamaian	45
3.2.2	Pendekatan Perdamaian	52
3.3	Menilai Proses Perdamaian Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa	55
3.3.1	Analisis Strategi	55
3.3.2	Analisis Pendekatan.....	60
3.4	Rangkuman.....	65
BAB IV ANALISIS KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN PASCA		
KONFLIK PEMEKARAN KABUPATEN MAMASA		67
4.1	Teori Pembangunan Perdamaian Berkelanjutan dan Dinamikanya.....	67
4.1.1	Kapasitas dan Kerentanan Perdamaian.....	68
4.1.2	Kebertahanan Perdamaian dan Tantangannya	70
4.2	Gambaran Kapasitan dan Kerentanan Sosial di era Pemerintahan Ramlan Badawi.....	74
4.2.1	Situasi Konflik Perdamaian Terkini Pasca Konflik	74
4.2.2	Respons Pemerintah Kabupaten Mamasa era Ramlan Badawi.....	78
4.3	Analisis Perdamaian Berkelanjutan Pasca Konflik.....	83
4.3.1	Kapasitas dan Kerentanan Perdamaian Ditinjau dari Fase dan Hambatan	83
4.3.2	Analisis Peran Pemerintah Kabupaten Mamasa era Ramlan Badawi	85
4.4	Rangkuman	93
BAB V PENUTUP.....		94
5.1	Kesimpulan.....	94

5.1.1	Strategi Perdamaian (Pemprov Sulsel dan Sulbar).....	95
5.1.2	Pendekatan Perdamaian (Pemprov Sulsel dan Sulbar)	96
5.1.3	Peran Pemerintah Kabupaten Mamasa era Ramlan Badawi.....	96
5.2	Rekomendasi.....	97
5.2.1	Bagi Pemerintah Kabupaten Mamasa, Organisasi Perdamaian, dan Masyarakat.....	97
5.2.2	Bagi Penelitian Selanjutnya	99
DAFTAR PUSTAKA.....		101
LAMPIRAN.....		107



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Mamasa	2
Gambar 1.2 Kronologi Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa.....	4
Gambar 1.3 Kerangka Teori.....	14
Gambar 2.1 Peta Wilayah/Zona III Mamasa.....	19
Gambar 2.2 Peta Wilayah PUS (gunung) dan Wilayah PBB (pesisir).....	39
Gambar 3.1 Kerangka Analisis Strategi dan Pendekatan.....	42
Gambar 3.2 Hasil Analisis Strategi dan Pendekatan Pemprov Sulsel dan Pemprov Sulbar.....	65
Gambar 4.1 Kerangka Analisis Keberlanjutan Perdamaian Pasca Konflik	68
Gambar 4.2 <i>Peace and Development Analysis</i> (PDA) dari Lambang Trijono.....	69
Gambar 4.3 Jumlah Kasus Kriminal di Kabupaten Mamasa 2013-2023	87
Gambar 4.4 Hasil Analisis Peran Pemerintah Kabupaten Mamasa	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Bupati Mamasa dan Keterwakilan Agama	7
Tabel 2.1 Persentase APS Empat Kecamatan Tahun 2022/2023.....	24
Tabel 2.2 Bahasa Pitu Ulunna Salu (Kare J. Strómme)	30
Tabel 3.1 Strategi dan Pendekatan Pembangunan Perdamaian Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa.....	64
Tabel 4.1 Kapasitas dan Kerentanan Perdamaian Pasca Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa	82



ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, yang terjadi karena pro-kontra Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Mamasa dan Palopo. Intervensi yang diberikan hanya terlaksana di tataran elit dan masyarakat akar rumput pasca konflik masih terdiferensiasi. Selain itu, kelompok pro pemekaran (Keluarga *Massebambangam*) pasca konflik merasa tidak puas karena birokrasi pemerintahan yang saat ini dijalankan oleh pihak kontra pemekaran (Masyarakat Aralle-Mambi). Dari kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan penelitian, yakni 1) mengapa Keluarga *Massebambangam* yang pro pemekaran merasa belum menerima keadilan dari hasil pemekaran Kabupaten Mamasa? dan 2) Bagaimana analisis atas peran pemerintah pasca konflik dengan menggunakan perspektif pembangunan perdamaian yang berkelanjutan?

Penelitian yang menggunakan teori dari Ho-Won Jeong dan Lambang Trijono ini, menelusuri strategi dan pendekatan perdamaian yang diberikan saat konflik, oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2003-2005) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (2005-2009), serta menelusuri peran pemerintah Kabupaten Mamasa pasca konflik di era Ramlan Badawi (Bupati Mamasa 2011-2023). Dalam menelusuri strategi dan pendekatan, penulis berpedoman pada teori Jeong yang membagi aspek-aspek dalam strategi, yakni integrasi dan koordinasi kegiatan, integrasi kegiatan perdamaian di tingkat makro dan mikro, dan integrasi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang; dan pendekatan yang sering digunakan dalam membangun perdamaian, yakni minimalis dan maksimalis. Dalam mengevaluasi peran Pemerintah Kabupaten Mamasa pasca konflik, penulis menggunakan teori Trijono yang mampu menggambarkan kapasitas dan kerentanan perdamaian pasca konflik, yang kemudian dianalisis dengan teori Jeong mengenai fase yang dijalani dan hambatan yang dihadapi masyarakat pasca konflik pemekaran Kabupaten Mamasa.

Penelitian ini menemukan bahwa permasalahan pada strategi yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel dan Pemprov Sulbar saat konflik adalah identifikasi aktor-aktor dalam konflik yang tidak memadai (hanya mengidentifikasi elit), sedangkan pada pendekatan maksimalis yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel dan Pemprov Sulbar saat konflik adalah pendekatan akomodasi yang mengabaikan Keluarga *Massebambangam*. Penelitian juga menemukan peran pemerintah Kabupaten Mamasa (era Ramlan Badawi) pasca konflik, bahwa meskipun Ramlan telah proaktif dalam merespons isu SARA, ia tidak mampu menggunakan forum politik untuk meningkatkan kapasitas lembaga adat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan *Passaluam* (rekonsiliasi). Bahkan Ramlan belum berhasil meningkatkan kapasitas Keluarga *Massebambangam* merupakan ketidakterhasilannya dalam pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *konflik pemekaran kabupaten mamasa, pendekatan perdamaian, peran pemerintah, pembangunan perdamaian berkelanjutan, strategi perdamaian*

ABSTRACT

The background of this research is the conflict over the expansion of Mamasa Regency, which occurred due to the pros and cons of Law Number 11 of 2002 concerning the Expansion of Mamasa and Palopo Regencies. The interventions provided were only implemented at the elite level and the post-conflict grassroots community was still differentiated. In addition, the post-conflict pro-expansion group (Massebambangam Family) feels dissatisfied because the government bureaucracy is currently run by the counter-expansion party (Aralle-Mambi Community). From these conditions, this research seeks to answer two research questions, namely 1) why do the pro-expansion Massebambangam Families feel that they have not received justice from the results of the expansion of Mamasa Regency? and 2) How is the post-conflict role of the government analysed using a sustainable peacebuilding perspective?

This research, which uses the theories of Ho-Won Jeong and Lambang Trijono, explores the peace strategies and approaches provided during the conflict, by the South Sulawesi Provincial Government (2003-2005) and the West Sulawesi Provincial Government (2005-2009), and explores the role of the Mamasa Regency government after the conflict in the era of Ramlan Badawi (Mamasa Regent 2011-2023). In exploring strategies and approaches, the author is guided by Jeong's theory which divides aspects of strategy, namely integration and coordination of activities, integration of peace activities at the macro and micro levels, and integration of short, medium and long term strategies; and approaches that are often used in building peace, namely minimalism and maximalism. In evaluating the role of the Mamasa Regency Government after the conflict, the author uses Trijono's theory which is able to describe the capacity and vulnerability of post-conflict peace, which is then analysed with Jeong's theory regarding the phases undertaken and the obstacles faced by the community after the Mamasa Regency expansion conflict.

This research found that the problem with the strategies carried out by the South Sulawesi and West Sulawesi Provincial Governments during the conflict was the inadequate identification of actors in the conflict (only identifying elites), while the maximalist approach taken by the South Sulawesi and West Sulawesi Provincial Governments during the conflict was an accommodation approach that ignored the Massebambangam Family. The research also found the role of the Mamasa Regency government (Ramlan Badawi era) after the conflict, that although Ramlan had been proactive in responding to the SARA issue, he was unable to use political forums to increase the capacity of customary institutions as institutions that have the authority to conduct Passaluam (reconciliation). That Ramlan has not even succeeded in increasing the capacity of the Massebambangam Family is an indication of his failure in sustainable peacebuilding.

Keywords: *mamasa district expansion conflict, peace approach, government role, sustainable peacebuilding, peace strategy*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Lambang Trijono, konflik kekerasan yang terjadi selama ini telah menimbulkan dampak dan beban tersendiri bagi masyarakat. Sebagai akibat dari konflik tersebut, kawasan Indonesia timur kini terbebani berbagai masalah sosial seperti segregasi antar kelompok etnis-agama, kemiskinan dan pengangguran yang meningkat, kesenjangan sosial ekonomi, dan ketidakstabilan politik dan pemerintahan.¹ Trijono berpendapat, bahwa selain karena pihak yang berkonflik biasanya berbeda identitas dan kepentingan, daerah pasca konflik menghadapi tantangan yang berkaitan dengan masih lemahnya kelembagaan sosial-politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mengatasi berbagai potensi konflik terpendam, ketegangan struktural dan berbagai hambatan perdamaian dihadapi masyarakat pasca-konflik.²

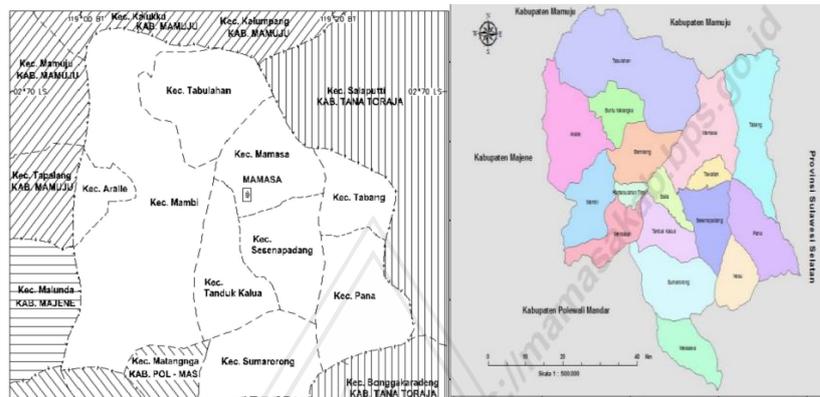
Salah satu konflik yang selaras dengan pendapat Trijono di atas adalah konflik pemekaran Kabupaten Mamasa atau konflik ATM (Aralle, Tabulahan, Mambi). Konflik yang peristiwanya berada di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat ini pecah karena pro-kontra Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Mamasa dan Palopo (Mamasa mekar dari Kabupaten Polewali Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar saat ini). Penyebab konflik tidak hanya berkaitan dengan otonomi daerah, tetapi karena beberapa konteks lain, seperti agama dan etnisitas, batas wilayah/dualisme pemerintahan, hingga keterlibatan dan kepentingan para elit lokal. Beberapa literatur menyebutkan bahwa intervensi yang dilakukan pada konflik ini hanya terlaksana di tataran elit.³ Berbeda dengan masyarakat akar rumput pasca konflik, masih terdiferensiasi karena sisa-sisa konflik dan ketidakpuasan masyarakat pasca konflik. Uniknyanya masyarakat yang tidak puas ini justru tergabung dalam kelompok pro pemekaran Kabupaten Mamasa. Mereka tidak puas pada jalannya birokrasi pemerintahan pasca konflik, karena dijalkan oleh pihak kontra

¹ Lambang Trijono, *Pembangunan Sebagai Perdamaian* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 89–90.

² Lambang Trijono, "Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13, no. 1 (Juli 2009): 49.

³ Tabah Maryanah, "Governance dalam Manajemen Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 4, no. 1 (2013): 15; Muhammad Subhan. SD, "Rivalry of the Elites in Ethno-Religious Conflicts: Dynamics of Conflict Arising from Territorial Split of Mamasa," *International Journal of Business and Social Science* 9, no. 11 (2018): 21, <https://doi.org/10.30845/ijbss.v9n11p5>; Sofian Munawar Asgart, "Monograf Kabupaten Mamasa, narrative report," narrative report (Hivos-Yayasan Interseksi, 2015), 64–66, https://www.academia.edu/15627930/Monograf_Kabupaten_Mamasa.

pemekaran. Selain itu, kelompok masyarakat pro pemekaran juga berprasangka karena ketidaksetaraan ekonomi dibandingkan kelompok kontra pemekaran, saat konflik.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Mamasa 2005 dan 2023

Sumber: Lampiran C International Crisis Group dan BPS Mamasa

1.1.1 Konteks Konflik dan Kekerasan

Salah satu alasan kelompok kontra pemekaran menolak bergabung dengan Kabupaten Mamasa adalah hubungan etnis-agama dengan kabupaten sebelumnya, yakni Kabupaten Polewali Mandar.⁴ Ini terjadi karena pihak kontra pemekaran menganggap bahwa di masa lalu, mereka telah dipersatukan dengan Kabupaten Polewali melalui suatu ikatan, untuk saling melindungi. Ikatan ini disebut “*Sipamandar*” (saling menguatkan) dan termuat dalam perjanjian *Allewuang Batu di Luyo*, yang menyatakan bahwa “tujuh wilayah pegunungan (*Pitu Ulunna Salu*) tidak dapat dipisahkan dengan tujuh pesisir (*Pitu Ba'bana Binanga*). Alasan lainnya adalah pusat pemerintahan yang akan ditempatkan di Kecamatan Mamasa (ibu kota Kabupaten Mamasa sekarang). Penolakan ini ditengarai karena secara kebetulan pihak kontra mayoritas beragama Islam dan menganggap kelompoknya lebih terhormat kedudukannya dibanding Kecamatan Mamasa yang kebetulan mayoritas beragama Kristen.⁵ Adapun kelompok pro pemekaran, menyatakan sikap politiknya karena menginginkan hadirnya pembangunan (kemajuan dalam bidang infrastruktur, sarana-sarana publik seperti akses pendidikan, kesehatan, dan kemudahan akses pelayanan kemasyarakatan lainnya). Kelompok pro pemekaran, juga mengacu pada aspek historis, dengan menganggap bahwa Mamasa dan Polewali sebenarnya telah berpisah secara administrasi sebelum tahun

⁴ Subhan, SD, “Rivalry of the Elites in Ethno-Religious Conflicts,” 39.

⁵ Wilayah pegunungan adalah wilayah konflik antara kelompok pro dan kontra. Sedangkan wilayah pesisir adalah wilayah kabupaten sebelumnya (Kabupaten Polmas) Lihat: Hamdar Arraiyah dan H. Nahar Nahrawi, “Menuju Damai dengan Kearifan Baru (Studi Kasus Pasca Konflik Di Aralle, Tabulahan dan Mambi),” *Al-Qalam* 11, no. 2 (2005): 31–35, <https://doi.org/10.31969/alq.v11i2.588>.

1959, dimana pemerintah kolonial Belanda memang memisahkan keduanya sebagai wilayah *kewedanan*, namun disatukan di era orde baru.⁶

Polarisasi kedua belah pihak semakin menguat karena terlibatnya dimensi etnis-agama, bahkan dalam laporan International Crisis Group, simpatisan dari Poso juga terlibat dalam konflik ini.⁷ Adapun pihak kontra terorganisir dalam kelompok *Ikatan Keluarga Pitu Ulunna Salu* (IKPUS), sedangkan pihak pro menamai kelompoknya dengan sebutan *Keluarga Masebambangam*.⁸ Meskipun tidak bisa digeneralisir seluruhnya, IKPUS dapat diidentifikasi sebagai masyarakat dari Kecamatan Aralle-Mambi, sedangkan Keluarga Masebambangam sebagai masyarakat Kecamatan Bambang-Buntu Malangka'. Dalam penelitian ini, term “*Keluarga Masebambangam*” akan digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang pro pemekaran saat konflik, dan “*Aralle-Mambi*” untuk masyarakat yang kontra pemekaran.

Konflik pemekaran Kabupaten Mamasa dalam laporan Crisis Group bermula dari kampanye pemekaran di tahun 1999 yang di tentang oleh 26 desa dari Kecamatan Aralle, Tabulahan, dan Mambi (Gambar 1.2). 26 desa kontra ini berhadapan dengan 12 desa yang pro dari tiga Kecamatan yang sama. Tindakan kekerasan mulai terjadi pada bulan April-Mei 2003, di mana serangkaian penyerangan antara pihak pro dan kontra pemekaran, karena sikap politik yang berbeda tersebut. Serangan-serangan ini berdampak pada kedua pihak karena masing-masing warganya mengungsi, tidak bisa menggarap lahan, dan akses sekolah ditutup bagi siswa yang afiliasi politiknya berbeda. Pada 29-30 September 2003, perselisihan akibat batas desa antara warga Desa Salurindu (kontra) dan Desa Bumal (pro) mengakibatkan tiga korban jiwa dan eksodus sekitar 8.460 orang ke daerah yang afiliasi politiknya sama. Pada 06 Oktober 2003, dilakukan mediasi di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, dan menghasilkan kesepakatan agar kedua belah pihak menghentikan kekerasan dan penyelesaian tapal batas desa akan segera diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.⁹

⁶ International Crisis Group, “Decentralisation and Conflict in Indonesia: The Mamasa Case,” *Singapore/Brussels, Asia Briefing No 37*, 3 Mei 2005, 2.

⁷ Hanya karena Mamasa mayoritas beragama Kristen dan 26 desa yang kontra pemekaran mayoritas beragama Islam, membuat persepsi orang luar tentang konflik ATM sebagai konflik agama. Bahkan isu ini menarik perhatian kaum radikal Muslim dari daerah luar, seperti pemuda yang sebelumnya terlibat dalam konflik Poso. Lihat: Crisis Group, 1.

⁸ Kelompok kontra memakai simbol-simbol imperium sejarah kehadiran *Pitu Ulunna Salu* (PUS) untuk melegitimasi penolakannya. Sedangkan kelompok pro hanya mengidentikkan diri sebagai orang Bambang atau *Masebambangam* (keseluruhan orang Bambang) yang berasal Bambang, Buntu Malangka', dan Rantebulahan Timur. Lihat: Subhan, ‘Rivalry of the Elites in Ethno-Religious Conflicts’, 39–40.

⁹ Crisis Group, 4–5.



Gambar 1. 2 Kronologi Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa

Sumber: International Crisis Group (Diolah)

April 2004, terjadi pemboikotan Pemilu dan Pileg oleh pihak kontra di Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, karena permintaannya untuk ikut memilih sebagai warga Kabupaten induk (Polewali Mamasa) ditolak KPU Provinsi Sulawesi Barat. Pada Juli 2004, terjadi pengrusakan tiga rumah pejabat pemerintah pro Mamasa di Kecamatan Mambi. Akibatnya, pada 23 Juli 2004, pihak pro Mamasa mendirikan pos blokade lalu lintas untuk pihak kontra yang melintas. Blokade ini dilakukan karena pihak kontra juga melakukan blokade jalan di Pokko' (perbatasan Mamasa-Polewali). Blokade jalan dicabut pada 03 Agustus 2004 karena mediasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Namun kondisi kembali memanas pada September 2004, di mana Camat Aralle versi Mamasa, pejabat Bappeda, dan satu orang pemuda pro pemekaran dipukuli setelah mengikuti kunjungan silaturahmi dua Bupati (Polewali dan Mamasa) di Kecamatan Mambi. Selain itu, pada 07 Oktober 2004, seorang delegasi dari pihak pro Mamasa datang ke Aralle untuk memperbaiki rumah pemimpin mereka, tetapi memasang spanduk yang bunyinya "Aralle adalah bagian dari Mamasa". Hal ini menimbulkan saling lempar batu antara pihak pro dan kontra di Aralle. Seminggu setelah insiden pertikaian Aralle pada 15-20 Oktober 2004, massa dari pihak pro Mamasa membakar 16 rumah di Aralle yang mengakibatkan sebagian besar warga Aralle mengungsi ke Mambi. Insiden ini mengakibatkan tiga korban jiwa, 47 kehancuran rumah dan eksodus sekitar 2.000 orang kontra Aralle ke Mambi. Dan pada 26 Oktober 2004, polisi melakukan serangkaian

penangkapan, termasuk tersangka pembunuhan tahun 2003 di Salurindu dan penyerangan terhadap rumah-rumah pada bulan Mei 2003.¹⁰

Ketidakpuasan pihak kontra setelah Kabupaten Mamasa terbentuk, berimbas pada penyerangan warga Dusun Ranu, Desa Salubanua, Kecamatan Mambi pada 24 April 2005. Pihak kontra menembaki penduduk desa dan mengakibatkan lima korban jiwa, serta melakukan pembakaran rumah.¹¹ Selain tindakan kekerasan, perilaku lain yang tampak adalah dualisme pemerintahan, di mana Camat versi Mamasa diangkat, di samping Camat versi Polewali. Begitupun dengan PNS, yang kontra akan memilih untuk menerima gaji dari Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan yang pro akan melakukan berbagai upaya untuk menjalankan undang-undang pemekaran Kabupaten Mamasa.¹²

1.1.2 Tata Kelola Konflik dan Implikasinya

Konflik pemekaran Kabupaten Mamasa dikelola penyelesaiannya oleh berbagai pihak. Di awal konflik, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menengahi kelompok pro dan kontra dari tahun 2003-2005. Setelah itu dilanjutkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang dimekarkan dari Sulawesi Selatan tahun 2005. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengambil alih administrasi tiga kecamatan yang berkonflik tersebut, dari tahun 2005-2009. Di tahun 2009, Sulawesi Barat mengembalikan tiga Kecamatan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa, dan menjadi wilayah administrasi Kabupaten Mamasa hingga sekarang. Dapat disebut, bahwa selain Kabupaten Mamasa, kedua institusi pemerintah daerah ini adalah pihak yang mengelola konflik pemekaran Kabupaten Mamasa. Wawancara Sofian Munawar Asgart dengan staf kepegawaian dari Kecamatan Mambi, memberikan pengantar mengenai cara para pihak ini mengelola konflik.

Sepanjang konflik, warga sebenarnya hanya menjadi korban dari ambisi para elit politik. Ada elit yang merasa akan diuntungkan dengan pemekaran dan ada juga yang sebaliknya. Kalau kalangan masyarakat kecil sebenarnya tergantung elit politik, buktinya ketika kepentingan para elit telah terakomodasi, konflik dapat berhenti.¹³

Sejalan dengan hasil wawancara Asgart di atas, Maryanah dalam temuannya menyebut bahwa upaya rekonsiliasi konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, hanya terjadi di tingkat elit dan tidak mengikutsertakan masyarakat yang lebih banyak menderita dan merugi karena konflik.¹⁴

¹⁰ Crisis Group, 5-7.

¹¹ Crisis Group, 7-8.

¹² Arraiyah and Nahrawi, 'Menuju Damai dengan Kearifan Baru (Studi Kasus Pasca Konflik Di Aralle, Tabulahan dan Mambi)', 36.

¹³ Asgart, 'Monograf Kabupaten Mamasa, Narrative Report', 66.

¹⁴ Maryanah, 'Governance Dalam Manajemen Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa', 15.

Hasil dari didamaikannya para elit saat konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, dapat dilihat pada riset Mahyuddin dan Febry. Mereka menemukan integrasi sosial masyarakat pasca konflik, melalui representasi keterwakilan identitas (agama Islam dan Kristen) di bidang eksekutif Mamasa. Mahyuddin dan Febry menyatakan bahwa representasi ini merupakan upaya mitigasi pasca konflik, sehingga politikus di Mamasa dinilai telah berperan signifikan dalam reintegrasi sosial melalui perpaduan identitas agama dalam posisi Bupati dan Wakil Bupati.¹⁵ Keterwakilan melalui perpaduan identitas dalam pemerintahan di Kabupaten Mamasa juga disorot oleh Arsyad dan Sari. Temuan mereka mengemukakan bahwa representasi identitas dihasilkan dari konsensus damai setelah berakhirnya konflik pemekaran Kabupaten Mamasa. Konsensus ini menghasilkan dua poin penting, antara lain: 1) memisahkan urusan pemerintahan dan agama karena telah menjadi pendorong konflik, dan 2) pemerintahan Kabupaten Mamasa yang akan dibentuk harus memperhatikan prinsip keterwakilan antar umat beragama. Apabila Bupati beragama Islam maka Wakil Bupati harus Non-Muslim begitupun sebaliknya. Menurut Arsyad dan Sari konsensus damai tersebut tercipta karena trauma konflik pemekaran Kabupaten Mamasa sebagai pelajaran masa lalu agar tidak terulang kembali.¹⁶ Terlepas dari benar tidaknya konsensus tersebut, temuan Mahyuddin dan Febry memang menunjukkan bahwa representasi identitas dalam birokrasi Kabupaten Mamasa nyata adanya. Hal ini tergambar dari Bupati dan Wakil Bupati yang pernah menjabat di Mamasa, sebagai objek dari konsensus damai (Tabel 1).

Asgart di sisi lain menyebut bahwa politik di Mamasa, seakan didesain untuk menyeimbangkan kepentingan para elit (politik perimbangan).¹⁷ Asgart menjelaskan bahwa sejumlah peristiwa politik penting, termasuk konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, mengindikasikan adanya upaya-upaya akomodatif terhadap kepentingan kekuatan sosial-politik yang dominan secara berimbang. Masing-masing kekuatan sosial-politik berupaya

¹⁵ Mahyuddin dan Muhammad Zaldy Febry, "Representasi Identitas Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai Media Resolusi Konflik Etnoreligius di Mamasa," *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (April 2023): 116–120.

¹⁶ Rahmad Arsyad dan Endang Sari, "Peace Consensus of The Political Identity In Mamasa District," dalam *Proceedings of the Proceedings of the 1st Hasanuddin International Conference on Social and Political Sciences, HICOSPOS 2019, 21-22 October 2019, Makassar, Indonesia* (Proceedings of the 1st Hasanuddin International Conference on Social and Political Sciences, HICOSPOS 2019, 21-22 October 2019, Makassar, Indonesia, Makassar, Indonesia: EAI, 2020), 3–4, <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2291528>.

¹⁷ Kelompok "orang bawah" yang Asgart identifikasi dalam politik perimbangan ala Mamasa, diartikan sebagai banyaknya elit beragama Islam yang mewakili "orang bawah". Mereka tersebar dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif di Mamasa. Namun sesungguhnya, populasi penduduk "orang bawah" mayoritas beragama Kristen, sesuai data dari Dukcapil Kemendagri (Kristen: 31.896, Islam: 21.549, dan Agama lokal/Ada' Mappurondo: 5234). Lihat: Sofian Munawar Asgart, "Monograf Kabupaten Mamasa, narrative report," narrative report (Hivos-Yayasan Interseksi, 2015), 90–92, https://www.academia.edu/15627930/Monograf_Kabupaten_Mamasa.

menjaga pola perimbangan kekuasaan untuk merepresentasikan kepentingan kelompok masing-masing. Asgart membagi kekuatan sosial-politik di Kabupaten Mamasa menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diidentifikasi sebagai "orang atas," meliputi masyarakat di Kecamatan Mamasa, Balla, Sesenapadang, Tawalian, Pana, Nosu, dan Tabang. Sementara kelompok kedua diidentifikasi sebagai "orang bawah," yang meliputi sebagian besar masyarakat Mambi, Rantebulahan Timur, Aralle, Bambang, Buntu Malangka, dan Tabulahan. Secara religius, kelompok pertama (orang atas) diasosiasikan sebagai "kelompok Kristen" sementara kelompok kedua (orang bawah), terutama di wilayah Mambi dan Aralle, diasosiasikan sebagai "kelompok Islam".¹⁸

Tabel 1.1 Daftar Bupati Mamasa dan Keterwakilan Agama

Bupati	Wakil Bupati	Periode
M. Said Saggaf (Islam)	Viktor Paotonan (Kristen)	2003-2008
Obednego Depparinding (Kristen)	Ramlan Badawi (Islam)	2008-2011
Ramlan Badawi (Islam)	-	2011-2013
	Viktor Paotonan (Kristen)	2013-2016
	Bonggalangi (Kristen)	2016-2018
	Marthinus Tiranda (Kristen)	2018-2023
Yakub F Solon (PJ. Bupati Mamasa)	Kristen	2023
Dr. Muhammad Zain (PJ Bupati Mamasa)	Islam	2023

Sumber: Diolah¹⁹

Asgart menyatakan bahwa politik perimbangan di Mamasa telah menjauhkan politik dari wacana kewargaan, di mana tolok ukurnya adalah peningkatan kasus korupsi dan status sebagai daerah terbelakang di Sulawesi Barat. Penyebabnya adalah kurangnya mekanisme kontrol terhadap pemerintahan. Banyak anggota DPRD tidak menjalankan fungsi

¹⁸ Istilah "orang bawah" dan "orang atas" yang disebutkan Asgart merupakan metafora yang menggambarkan perbedaan posisi politik dan geografis antara dua kelompok. "Orang bawah" berada di sisi utara Mamasa dengan daratan yang sedikit lebih rendah, sedangkan "orang atas" berada di sisi selatan Mamasa dengan dataran yang lebih tinggi.

¹⁹ Obednego Depparinding hanya menjabat sebagai Bupati Mamasa dari tahun 2009-2011 karena tersandung kasus korupsi. Sedangkan Viktor Paotonan hanya menjabat dari tahun 2013-2016 karena meninggal dunia. Lihat: "Daftar Bupati Mamasa," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 27 Mei 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_Bupati_Mamasa&oldid=21156878#cite_note-5; "Inilah Daftar Bupati Mamasa Sulawesi Barat, Nomor 3 Paling Lama - Halaman 3," diakses 20 November 2023, <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3117102828/inilah-daftar-bupati-mamasa-sulawesi-barat-nomor-3-paling-lama?page=3>.

pengawasan dengan baik dan malah terlibat dalam lobi-lobi tender proyek dengan pemerintah. Media dan LSM juga belum berfungsi sebagaimana mestinya; sikap kritis terhadap kinerja pemerintahan tidak muncul karena adanya kepentingan tertentu.²⁰ Penjelasan Asgart mengenai lemahnya "politik kewargaan" karena "perimbangan kekuasaan" sejalan dengan sikap masyarakat Buntu Malangka' dan Bambang (Keluarga *Massebambangam*). Sebagaimana diketahui bahwa "orang bawah" didominasi oleh elit Aralle dan Mambi. Sebagaimana sikap pro pemekaran yang diambil oleh Keluarga *Massebambangam*, dilandaskan pada harapan pembangunan dan lapangan kerja (seperti menjadi PNS). Namun keuntungan justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok kontra pemekaran, yakni orang Mambi dan Aralle.

Salah satu tokoh yang memiliki peran sentral dari serangkaian kondisi pasca konflik di atas adalah Ramlan Badawi. Ramlan adalah politikus asal Aralle, yang mengawali karirnya sebagai guru dan menjadi Bupati Mamasa selama lebih dari satu dekade (2011-2023).²¹ Saat konflik pecah, Ramlan tergabung dalam kelompok pro pemekaran Kabupaten Mamasa. Dalam laporan International Crisis Group, rumah Ramlan pernah dirusak oleh kelompok kontra Kabupaten Mamasa, karena dirinya merupakan birokrat versi Kabupaten Mamasa.²² Ramlan sebagai Bupati Mamasa yang di satu sisi berasal dari Kecamatan Aralle (wilayah kelompok kontra pemekaran), namun memilih bersikap pro pemekaran, tentu memiliki upaya dalam membangun perdamaian pasca konflik.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang menguraikan penyebab konflik, tata kelola, dan implikasinya di atas memperlihatkan kompleksitas pasca konflik pemekaran Kabupaten Mamasa yang belum memenuhi cita-cita perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini karena ketidakpuasan Keluarga *Massebambangam* (kelompok pro pemekaran), dengan keuntungan ekonomi dan politik yang justru didapatkan oleh masyarakat Aralle-Mambi (kelompok kontra pemekaran) karena mengisi birokrasi pemerintahan Kabupaten Mamasa. Ketidakpuasan Keluarga *Massebambangam*, mesti dijawab dengan alat analisis yang mampu menelusuri *strategi* dan *pendekatan* perdamaian yang dilakukan saat konflik dan mampu menelusuri peran pemerintah Kabupaten Mamasa pasca konflik:

²⁰ Asgart, 93–95.

²¹ "Kabupaten Mamasa Official Website," diakses 22 Desember 2022, https://www.mamasakab.go.id/index.php?jenis=ct_bwh&kode_cont=Profil_Bupati_Mamasa.htm.

²² Crisis Group, 5

A. Strategi dan Pendekatan

Dalam upaya penelusuran strategi dan pendekatan, penulis berfokus pada dua pihak yang menengahi konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2003-2005) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (2005-2009). Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterlibatan Keluarga *Massebambangam* dalam kegiatan pembangunan perdamaian, serta mengidentifikasi bentuk akomodasi yang diberikan ke mereka. Keterlibatan Keluarga *Massebambangam* dalam kegiatan perdamaian melalui strategi, serta akomodasi yang diberikan ke Keluarga *Massebambangam* melalui pendekatan, menjadi tolok ukur penyebab ketidakpuasan karena didalamnya terkandung pondasi dasar bagi perdamaian berkelanjutan. Pondasi ini mencakup pengurangan kesenjangan ekonomi dan politik, pengidentifikasian aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, keterlibatan masyarakat akar rumput, hingga sejauh mana aspirasi kedua belah pihak diterima dengan pendekatan yang holistik.

B. Peran Pemerintah Kabupaten Mamasa Pasca Konflik

Begitupun dengan upaya menelusuri peran pemerintah Kabupaten Mamasa pasca konflik, di mana sikap Keluarga *Massebambangam* yang tidak puas dengan hasil pemekaran, akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana perdamaian berkelanjutan pasca konflik diintegrasikan ke dalam program pemerintah. Dalam upaya ini, penulis secara teoritis akan memeriksa kapasitas dan kerentanan perdamaian, untuk mengidentifikasi fase yang dijalani dan hambatan yang dihadapi. Hasil identifikasi tersebut akan ditujukan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang baik, kurang baik, dan langkah-langkah yang baik namun masih perlu ditingkatkan, dari pemerintah Kabupaten Mamasa. Evaluasi akan berfokus pada upaya yang dilakukan pada era pemerintahan Ramlan Badawi ketika ia menjabat sebagai Bupati Mamasa (2011-2023). Evaluasi ke Ramlan Badawi dirasa perlu, karena dirinya berasal dari wilayah konflik dan memiliki akses untuk terhubung kepada kedua kelompok, karena disatu sisi bergabung ke kelompok pro pemekaran, namun disisi lain berasal dari wilayah kelompok kontra. Dengan jabatan sebagai Bupati Mamasa, ia tentu memiliki pengaruh bagi kelangsungan tatanan sosial pasca konflik dengan kebijakan-kebijakannya.

Kedua upaya yang bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi keterlibatan Keluarga *Massebambangam* dalam kegiatan pembangunan perdamaian dan mengidentifikasi bentuk akomodasi yang diberikan ke mereka; serta 2) langkah-langkah baik, kurang baik, dan langkah-langkah yang baik namun masih perlu ditingkatkan, dari pemerintah Kabupaten Mamasa, pada akhirnya akan menghasilkan analisis dan evaluasi pasca konflik pemekaran

Kabupaten Mamasa. Hasil ini dapat menjadi bahan untuk masyarakat Mamasa dan pemerintah daerah Kabupaten Mamasa, dalam pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, berdasarkan rumusan masalah ini, maka penelitian ini akan diberi judul: “KAJIAN ATAS PERAN PEMERINTAH TERKAIT RELASI ANTAR WARGA PASCA KONFLIK PEMEKARAN KABUPATEN MAMASA MELALUI PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PERDAMAIAN YANG BERKELANJUTAN”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Melalui rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

- A. Mengapa Keluarga *Massebambangam* yang pro pemekaran merasa belum menerima keadilan dari hasil pemekaran Kabupaten Mamasa?
- B. Bagaimana analisis atas peran pemerintah (Pemprov Sulawesi Selatan, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemerintah Kabupaten Mamasa) pasca konflik dengan menggunakan perspektif pembangunan perdamaian yang berkelanjutan?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- A. Memberikan penilaian pada strategi dan pendekatan proses perdamaian pasca konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, melalui identifikasi keterlibatan dan bentuk akomodasi yang diberikan Keluarga *Massebambangam* dalam kegiatan pembangunan perdamaian pasca konflik.
- B. Mengetahui keberlanjutan perdamaian melalui peran Pemerintah Kabupaten Mamasa pasca konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, melalui identifikasi langkah-langkah yang dinilai baik, kurang baik, dan langkah-langkah yang baik namun masih perlu ditingkatkan.
- C. Menghasilkan analisis dan evaluasi pasca konflik pemekaran Kabupaten Mamasa bagi masyarakat Mamasa dan pemerintah daerah Kabupaten Mamasa untuk pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.

1.5 Kerangka Teori

Dalam meneliti peran pemerintah pasca konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, penulis akan menggunakan dua alat analisis, yakni teori *Desain Pembangunan Perdamaian*

yang dicetuskan oleh Ho-Won Jeong, dan *Peace and Development Analysis/PDA* yang dirumuskan oleh Lambang Trijono. Kedua alat analisis ini memberi paradigma teoritis yang mengarahkan analisis pada “pembangunan perdamaian yang berkeadilan dan berkelanjutan”. Oleh sebab itu, penulis menganggap bahwa kedua pendekatan ini akan sangat relevan bila digunakan untuk mengatasi keadaan yang rumit pasca konflik, melalui analisis dan evaluasi.

1.5.1 Desain Pembangunan Perdamaian

Ho-Won Jeong menyusun studi-studi tentang berbagai aspek proses konflik secara komprehensif di bawah judul “*Peacebuilding in Postconflict Societies: Strategy & Process*”. Buku ini memberikan penilaian terhadap proses pembangunan perdamaian, mulai dari strategi, pendekatan, hingga tujuan pembangunan perdamaian. Perangkat konseptual untuk rekonstruksi pasca konflik ini, pada prinsipnya melihat pembangunan perdamaian yang sering kali gagal dalam mencapai keberlanjutan karena; kurangnya kesepakatan tentang tujuan perdamaian, kurangnya koordinasi strategis, dan pemahaman yang dalam tentang kompleksitas pembangunan perdamaian. Oleh sebab itu, untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, maka diperlukan tujuan yang jelas, koordinasi strategis, kesepakatan bersama tentang definisi perdamaian, dan pemahaman mendalam tentang kompleksitas pembangunan perdamaian.

Pada proses strategi pembangunan perdamaian, Jeong menekankan pentingnya koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan saling mendukung satu sama lain; kegiatan dilakukan pada tingkat nasional, lokal, dan masyarakat; mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang; dan mengidentifikasi kegiatan yang menjadi prioritas utama dan prioritas kedua. Pada aspek pendekatan pembangunan perdamaian, Jeong berpendapat bahwa upaya yang dilakukan harus disesuaikan dengan realitas kompleks situasi konflik yang dihadapi. Ia membagi dua pendekatan dalam pembangunan perdamaian, yakni pendekatan minimalis yang berkaitan dengan hukum, ketertiban, dan pemulihan pemerintahan serta pendekatan maksimalis yang menekankan perubahan dalam struktur sosial terkait politik kekerasan. Pada bagian ini Jeong menganggap pendekatan maksimalis sebagai pendekatan yang peduli pada keadilan dan martabat manusia.²³

Selain berfokus pada strategi dan pendekatan, Jeong juga mengulas tantangan yang dihadapi dalam membangun perdamaian, mulai dari dinamika struktural dan perubahan-

²³ Ho-Won Jeong, *Peacebuilding In Postconflict Societies: Strategy and Process* (London: Lynne Rienner Publishers, 2005), bb. 2: *Peacebuilding Design*.

perubahan persepsi dari individu yang berkonflik. Selain itu, Jeong juga memberi gambaran mengenai beberapa fase dalam membangun perdamaian, mulai dari pengendalian kekerasan, pengelolaan hubungan, dan reformasi struktural. Berdasarkan serangkaian proses tersebut, maka Jeong melihat pentingnya berbagai pihak yang menengahi konflik, agar memiliki tujuan dalam menjalankan agenda pembangunan perdamaian. Tujuan tersebut dibuat agar tercipta perdamaian yang stabil dan tahan lama (berkelanjutan). Jeong mendefinisikan perdamaian yang berkelanjutan sebagai upaya bersama untuk mengatasi konflik kekerasan di masa lalu, membantu masyarakat mengatasi kerentanan ekstrem, dan menuju masyarakat yang mandiri.

1.5.2 Integrasi Perdamaian dan Pembangunan

Lambang Trijono dalam bukunya yang berjudul “Pembangunan Sebagai Perdamaian”, menekankan perlunya mengintegrasikan program pemerintah dengan kondisi sosial masyarakat pasca konflik. Trijono melihat bahwa pembangunan Indonesia ke depan, Indonesia pasca konflik, selain diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, juga perlu mendorong pembangunan yang memberi kontribusi luas pada perdamaian masyarakat.²⁴ Sebagai pendekatan alternatif dari pembangunan arus utama (*mainstream development*), Trijono memperkenalkan metode Analisis Pembangunan dan Perdamaian (*peace and development analysis/PDA*). Proses PDA tersebut, menurut Trijono dapat membangun konsensus di antara berbagai pihak mengenai prioritas dan strategi pembangunan ke depan di suatu daerah pasca konflik.²⁵ PDA dipakai untuk menangkap dinamika konflik dan perdamaian di daerah pasca-konflik, dengan menganalisis tiga faktor, yaitu; analisis situasi konflik dan perdamaian terkini, analisis respons pembangunan, dan analisis kebijakan sensitif konflik.

Implementasi analisis PDA (2004) dapat dilihat dalam proyek *Peace Through Development* (PTD). Proyek ini merupakan kegiatan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nations Development Programme (UNDP) di tiga wilayah pasca-konflik Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah pada tahun 2005-2012. Proyek PTD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang peka terhadap konflik, dengan mempromosikan perdamaian melalui praktik pembangunan serta memperkuat pembangunan perdamaian melalui perencanaan partisipatif yang peka terhadap konflik melalui Musrenbang. Analisis PDA memberi rekomendasi kepada proyek PTD agar

²⁴ Trijono, *Pembangunan Sebagai Perdamaian*, 27.

²⁵ Trijono, 67–71.

pengarusutamaan pencegahan konflik dilakukan dengan: 1) meningkatkan praktik tata kelola lokal dan pembentukan forum dialog kebijakan, dan 2) memperkuat kapasitas perdamaian lokal melalui lembaga/mekanisme adat untuk manajemen konflik dan resolusi konflik, jurnalisme perdamaian, forum pendidikan perdamaian, forum perempuan jaringan CSO, dan peningkatan penghidupan untuk kohesi sosial.²⁶

1.5.3 Penggunaan Kerangka Teori

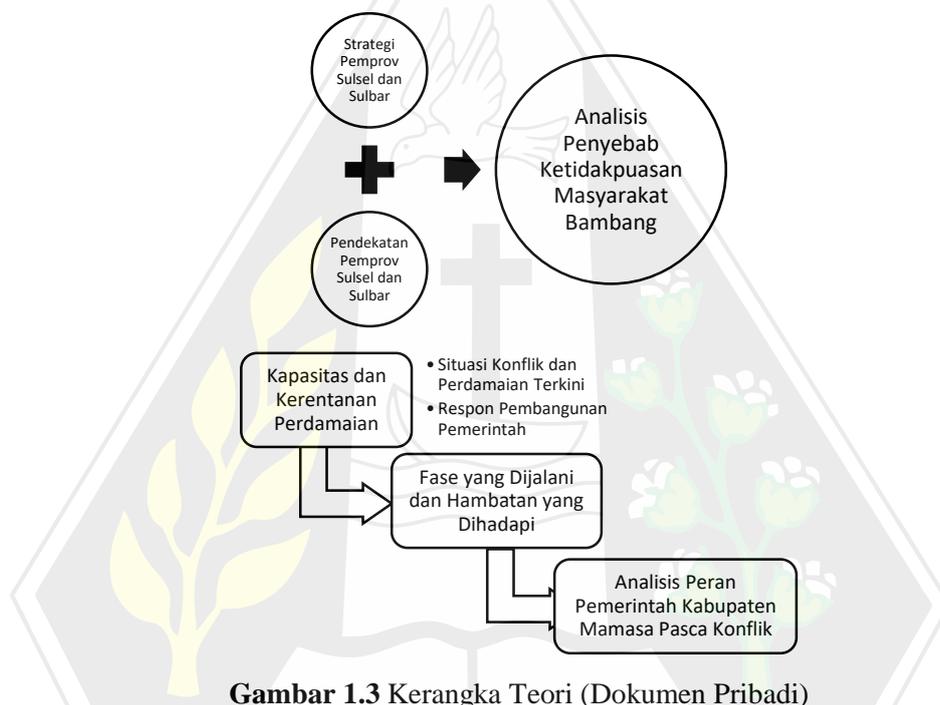
Kedua teori yang telah diuraikan diatas, memandang keberlanjutan perdamaian dengan tidak menggunakan prinsip “satu ukuran-cocok untuk semua” pada konflik; tidak hanya melibatkan para petinggi atau pejabat; tetapi mendeteksi berbagai unsur dalam struktur dan kultur yang dapat memancing kembalinya pertikaian dan menjalankan agenda perdamaian dengan melibatkan konteks lokal yang rumit. Meski demikian, kedua teori memiliki kekhasan masing-masing pada penggunaannya. Jeong misalnya, menyediakan desain analisis yang dapat digunakan untuk menelusuri strategi, pendekatan, dan tujuan pembangunan perdamaian. Sementara Trijono memberikan alat analisis untuk melihat kapasitas dan kerentanan perdamaian pasca konflik.

Jeong secara implisit mengkhususkan analisis *strategi* dan *pendekatan*, untuk menilai lanskap perdamaian yang dilakukan oleh pemerintahan darurat atau pemerintah sementara. Sedangkan *tujuan* perdamaian, Jeong pakai untuk menjelaskan hasil akhir penerapan strategi dan pendekatan. Sebagaimana diketahui, bahwa ia melihat tujuan yang harus diarahkan pada keberlanjutan dengan meningkatkan kapasitas lokal masyarakat. Namun Jeong mengingatkan, bahwa proses untuk mencapai keberlanjutan tersebut, akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan. Selain itu, Jeong juga mengklasifikasikan tiga fase yang dihadapi masyarakat pasca konflik, yakni fase *pengendalian kekerasan*, *pengelolaan hubungan*, dan *reformasi struktural*. Jeong secara implisit, menjelaskan bahwa keberlanjutan perdamaian masyarakat pasca konflik, akan ditanggung oleh pemerintahan baru, yang sudah memiliki legitimasi dan dipilih melalui proses demokrasi. Agar keberlanjutan perdamaian dapat dipahami dengan baik, maka diperlukan alat analisis tersendiri yang mampu memetakan keadaan terkini masyarakat pasca konflik. Dalam terang itulah, maka penulis akan memakai alat analisis PDA dari Lambang Trijono, yang mampu mengidentifikasi kapasitas dan kerentanan perdamaian pasca konflik. Trijono melalui PDA-nya mampu

²⁶ CSPPS UGM, “Final Evaluation Peace through Development (PTD): Prepared by Center for Security and Peace Studies, Gadjah Mada University” (New York: UNDP, 25 Oktober 2012), 8.

memeriksa situasi konflik dan perdamaian terkini, hingga respon pembangunan perdamaian dari pemerintah.

Berdasarkan kekhasan dari kerangka teori di atas, maka secara praksis penulis akan menganalisis *strategi* dan *pendekatan* pembangunan perdamaian yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel dan Sulbar. Proses penilaian ini bertujuan untuk menemukan penyebab mengapa Keluarga *Massebambangam* yang pro pemekaran, merasa tidak puas setelah Kabupaten Mamasa terbentuk. Sedangkan analisis *tujuan* pembangunan perdamaian akan meminjam tahapan analisis PDA dari Trijono untuk mengevaluasi peran pemerintah Kabupaten Mamasa dalam mengatasi dampak konflik pemekaran Kabupaten Mamasa.



Gambar 1.3 Kerangka Teori (Dokumen Pribadi)

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, di mana menurut Creswell penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema khusus ke tema umum, hingga menafsirkan

makna data.²⁷ Metode kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa cara penggunaan teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum untuk meneliti. Pandangan ini dapat menjadi perspektif transformatif dan dapat membantu merancang rumusan masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, bahkan membentuk panggilan melakukan aksi dan perubahan. Perspektif teoritis juga menuntun peneliti pada masalah yang perlu diteliti dan kelompok atau orang-orang yang diteliti.²⁸

1.6.2 Pengumpulan Data

Untuk memastikan pengumpulan data yang mencakup berbagai perspektif dan sumber informasi yang relevan, maka penelitian ini akan melalui pengumpulan data dengan wawancara kualitatif, observasi kualitatif, dan analisis dokumen-dokumen kualitatif.²⁹ Wawancara akan dilakukan terhadap objek yang relevan dengan subjek penelitian. Pada penelusuran strategi dan pendekatan pembangunan perdamaian saat konflik, penulis akan mewawancarai tim yang menengahi konflik (tim mediasi dan rekonsiliasi) serta perwakilan Keluarga *Massebambang* yang menerima program perdamaian, sedangkan untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Mamasa pasca konflik, maka penulis akan mewawancarai Ramlan Badawi (mantan Bupati Mamasa 2011-2023) dan beberapa tokoh dari Keluarga *Massebambang*.

Penulis juga akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan. Mulai dari publikasi akademis, buku, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, seperti kebijakan pemerintah. Observasi partisipatif akan penulis lakukan, dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati praktik-praktik, interaksi sosial, dan dinamika lokal, yang bertujuan untuk memahami konteks sosial, politik, dan budaya di Mamasa.

1.6.3 Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis data deskriptif tematik. Penelitian deskriptif adalah strategi penelitian di mana peneliti menyelidiki kejadian atau fenomena dalam kehidupan individu, dan meminta mereka atau kelompok untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian disusun kembali oleh peneliti dalam

²⁷ Ahmad Fawaid dan Rianayati. K Pancasari, penerj., *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*; Jhon W. Creswell, Edisi Keempat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4–5.

²⁸ Fawaid dan Pancasari, 85.

²⁹ Fawaid dan Pancasari, 254–55.

bentuk kronologi deskriptif. Ciri khas dari penelitian deskriptif adalah data yang diperoleh berupa kata-kata dan gambar, bukan angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Pada dasarnya, penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, seperti situasi dan kondisi, hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, serta akibat atau efek yang terjadi.³⁰

Heriyanto menyebut analisis data tematik merupakan salah satu cara untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Metode analisis ini relevan dengan penelitian yang hendak mengupas secara rinci data-data kualitatif yang dimiliki guna menemukan keterkaitan pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauh mana sebuah fenomena terjadi melalui kacamata peneliti. Heriyanto mengutip Holoway & Todres yang menyebut, bahwa analisis tematik merupakan dasar atau pondasi untuk kepentingan menganalisa dalam penelitian kualitatif.³¹ Dalam menggunakan analisis data deskriptif tematik, penulis akan menganalisis data kualitatif yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menggambarkan dan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul.

1.6.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Mamasa dan memusatkan perhatian pada dua objek penelitian. Objek pertama adalah strategi dan pendekatan yang dilakukan untuk menengahi konflik pemekaran Kabupaten Mamasa. Strategi dan pendekatan tersebut akan dinilai, dengan berfokus pada periode intervensi Pemprov Sulsel (2002-2005) dan periode intervensi Sulbar (2005-2009). Secara khusus akan ditelusuri, penyebab mengapa Keluarga *Massebambangam* tidak puas dengan hasil pemekaran Kabupaten Mamasa pasca konflik.

Objek kedua adalah keberlanjutan pembangunan perdamaian. Tahap ini akan dimulai dengan mengidentifikasi kapasitas dan kerentanan perdamaian, yang kemudian akan mengeksplorasi fase yang dijalani dan hambatan yang dihadapi. Secara khusus analisis akan berfokus pada peran pemerintah Kabupaten Mamasa, di era pemerintahan Ramlan Badawi dengan rentang waktu tahun 2011-2023.

³⁰ Rusandi dan Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (17 Juni 2021): 49–50, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

³¹ Heriyanto, 'Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif', *Anuva* 2, no. 3 (22 November 2018): 317–24, <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>.

1.7 Sistematika Penulisan

- A. **BAB I** penelitian ini berisi **Pendahuluan**, yang menguraikan gambaran umum garis besar penelitian, yang terdiri dari: latar belakang, kerangka teori, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian.
- B. **BAB II** berjudul **Gambaran Umum Keluarga *Massebambangam* dan Masyarakat Aralle-Mambi**, dimana pembahasan akan mencakup kondisi geografis dan kependudukan, kesejahteraan masyarakat, sosial budaya dan agama, pemerintahan dari masa ke masa, serta dinamika hubungan antara kedua.
- C. **BAB III** akan berjudul **Analisis Strategi dan Pendekatan Pembangunan Perdamaian Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa**. Bagian ini akan menilai proses pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian dalam konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, di periode intervensi Pemprov Sulsel dan periode intervensi Sulbar. Secara khusus akan ditelusuri penyebab mengapa masyarakat Keluarga *Massebambangam* tidak puas dengan pemekaran Kabupaten Mamasa.
- D. **BAB IV** berjudul **Analisis Keberlanjutan Pembangunan Perdamaian Pasca Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa**. Bagian ini akan menilai peran Pemerintah Kabupaten Mamasa di era Ramlan Badawi dalam membangun perdamaian berkelanjutan pasca konflik.
- E. **BAB V Penutup**, berisi kesimpulan hasil analisis dan evaluasi, serta saran bagi pemerintah Kabupaten Mamasa dan kedua kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik pemekaran Kabupaten Mamasa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Keluarga *Massebambangam* dan masyarakat Aralle-Mambi adalah dua komunitas yang memiliki ikatan sosial yang kuat. Leluhur mereka berasal dari Sa'dan Toraja dan bersama-sama membentuk konfederasi Pitu Ulunna Salu (PUS), menunjukkan bahwa hubungan darah di antara keduanya masih terjalin. Namun, kedua kelompok ini telah menghadapi berbagai episode sejarah yang mengkontraskan mereka secara sosial dan politik. Ini dimulai dari masuknya agama Islam di Mambi, kedatangan bangsa asing seperti Belanda dan Jepang, perjuangan melawan gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII), hingga konflik karena proses pemekaran Kabupaten Mamasa dan hubungan yang renggang pasca konflik.

Penelitian ini difokuskan pada episode pasca konflik yang terjadi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Mamasa dan Palopo. Sebagaimana diketahui, konflik ini terjadi karena kedua kelompok memiliki pandangan yang berbeda terkait pemekaran Kabupaten Mamasa. Keluarga *Massebambangam* mendukung pemekaran tersebut, sedangkan masyarakat Aralle-Mambi menentangnya. Konflik dimulai di Kecamatan Buntu Malangka' pada 2002 dan berakhir setelah kedua kelompok dijanjikan pemekaran Kabupaten Pitu Ulunna Salu. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2002-2005) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (2005-2009) berupaya untuk menengahi selama konflik berlangsung. Namun setelah konflik usai, kedua kelompok terbebani berbagai masalah sosial. Mereka mengalami polarisasi karena trauma konflik, serta kesenjangan sosial karena akses politik dan ekonomi. Polarisasi dan kesenjangan ini disebabkan karena kelompok yang dulu kontra pemekaran justru mengisi jabatan birokrasi di Mamasa. Sedangkan kelompok pro pemekaran, tetap terbelakang secara ekonomi dan kurang memiliki akses politik. Artinya, terbentuknya pemerintahan yang kelompok kontra tolak saat konflik, justru mereka yang jalankan (baca: kuasai). Kondisi ini secara tidak langsung, membuat Keluarga *Massebambangam* terus berprasangka dan tidak puas dengan hasil pemekaran kabupaten Mamasa. Benang merah yang menghubungkan antara sikap saat konflik, dengan kondisi pemerintahan pasca konflik ini, adalah tokoh politik asal Aralle bernama Ramlan Badawi. Ramlan adalah Bupati Mamasa (2011-2023) yang saat konflik, bersikap pro pemekaran.

Dengan merumuskan masalah; ketidakpuasan Keluarga *Massebambangam*, penulis telah menelusuri strategi dan pendekatan perdamaian yang dilakukan saat konflik, serta mengeksplor kapasitas dan kerentanan perdamaian pasca konflik. Perumusan masalah di atas, bertujuan untuk mengetahui keberlanjutan perdamaian pasca konflik, melalui analisis dan evaluasi menggunakan teori Ho-Won Jeong dan Lambang Trijono.

5.1.1 Strategi Perdamaian (Pemprov Sulsel dan Sulbar)

Untuk menganalisis strategi perdamaian, Jeong membagi tiga elemen analisis mencakup; 1) integrasi dan koordinasi kegiatan, dari pihak internal dan eksternal yang menengahi konflik; 2) integrasi kegiatan perdamaian di tingkat makro dan mikro; 3) integrasi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada aspek integrasi dan koordinasi kegiatan, strategi untuk menengahi konflik dijalankan oleh unsur penyelenggara daerah, yakni Pemprov Sulsel dan Pemprov Sulbar (eksternal). Pemprov Sulsel memfasilitasi mediasi dan membentuk lembaga Tim Mediasi Center (internal), sedangkan Pemprov Sulbar membentuk Panitia *Passaluam* dan Perdamaian (internal). Namun kedua pihak eksternal ini hanya fokus pada memediasi elit lokal, yang memiliki jabatan dan fungsi dalam masyarakat. Pembentukan lembaga mediasi dan rekonsiliasi, seakan hanya menjadi formalitas, karena kapasitas mereka sebagai fasilitator perdamaian tidak berusaha untuk untuk dibangun. Terlalu fokus pada penyelesaian masalah elit lokal, berujung pada pihak eksternal (Pemprov Sulbar) yang hanya mengakomodasi elit kontra pemekaran dari Aralle-Mambi. Aktor yang berperan signifikan di sini, adalah Anwar Adnan Saleh, tokoh politik Sulbar asal Aralle. Ia membina elit-elit dari Aralle dan Mambi setelah konflik selesai.

Selain lemahnya integrasi dan koordinasi kegiatan antara pihak eksternal dan internal, konflik pemekaran Kabupaten Mamasa rupanya diwarnai kompleksitas kepentingan berbagai aktor. Agenda terselubung menyulitkan kegiatan perdamaian dilakukan di semua tingkat (nasional, lokal, dan masyarakat). Selain elit lokal setempat, aktor-aktor yang berkepentingan juga berasal dari pihak yang menengahi konflik (Pemprov Sulsel dan Sulbar). Ragam kepentingan ini membuat strategi perdamaian yang dilakukan, tak mampu mencegah kekerasan. Penulis, dengan mengacu pada analisis aktor, mengidentifikasi konflik pemekaran Kabupaten Mamasa dengan melihat polarisasi pada tiga level aktor, yakni: Pemkab Polmas berhadapan dengan Pemkab Mamasa, elit Aralle-Mambi berhadapan dengan elit Mamasa, serta Keluarga *Massebambangam* berhadapan dengan masyarakat Aralle-Mambi. Ditemukan bahwa masyarakat Bambang yang saat konflik tidak memiliki banyak perwakilan politik, beraliansi dengan elit Mamasa karena kesamaan identitas dan ketidakpuasan saat menjadi bagian dari Kabupaten Polmas.

Implementasi strategi jangka pendek dan jangka menengah, dari Pemprov Sulsel dan Pemprov Sulbar cukup mampu menangani krisis sementara dari konflik. Namun strategi jangka panjang keduanya, belum mampu mereformasi persoalan struktural, kultural, dan personal. Hal ini disebabkan oleh identifikasi aktor konflik yang tidak memadai. Kurangnya keterlibatan Pemprov Sulsel dan Sulbar untuk turun langsung ke lapangan, serta koordinasi yang lemah dengan tim yang dibentuk membuat strategi yang diterapkan kurang terkoordinasi, bahkan tumpang tindih. Namun dalam analisis penulis, strategi sinkronisasi kegiatan temporal dari Jeong harus diadaptasi dengan hati-hati. Terutama dalam konteks konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, karena salah satu dampaknya adalah dualisme pemerintahan.

5.1.2 Pendekatan Perdamaian (Pemprov Sulsel dan Sulbar)

Untuk menganalisis pendekatan perdamaian, Jeong menjelaskan dua pendekatan yang biasanya digunakan dalam pembangunan perdamaian, yakni pendekatan maksimalis dan pendekatan minimalis. Pada proses pendekatan perdamaian konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, penulis menemukan pendekatan minimalis Pemprov Sulsel yang belum berhasil menstabilkan politik dan meredam kekerasan. Hal ini karena sepanjang tahun 2003-2004, telah dibentuk birokrasi pemerintahan dan provokator konflik dapat ditangkap, namun kekerasan masih terulang pada April 2005. Sementara itu, Pemprov Sulbar yang mengambil alih pemerintahan di wilayah ATM, melakukan pendekatan minimalis dengan memindahkan pejabat kontra pemekaran dan mengangkat pejabat definitif, serta pendekatan maksimalis melalui komunikasi persuasif dan pengalihan isu “pemekaran Kabupaten PUS” kepada elit pro dan kontra. Namun pendekatan maksimalis ini belum menyeluruh karena diabaikannya masyarakat Bambang. Tidak adanya elit politik dari Bambang, berdampak pada ketiadaan pihak yang mengakomodasi Keluarga *Massebambangam*.

5.1.3 Peran Pemerintah Kabupaten Mamasa era Ramlan Badawi

Dalam menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Mamasa di era Ramlan Badawi, penulis menggunakan alat analisis Lambang Trijono yang diberi nama Peace and Development Analysis (PDA). Alat ini digunakan untuk mengungkap kapasitas dan kerentanan perdamaian. Selanjutnya, kapasitas dan kerentanan ini dieksplorasi dengan menggunakan teori Ho-Won Jeong tentang tujuan pembangunan perdamaian, hambatan struktural, perilaku individu, serta tiga fase masyarakat pasca konflik (pengendalian kekerasan, pengelolaan hubungan, dan reformasi struktural). Kapasitas perdamaian pasca konflik di Pemekaran Kabupaten Mamasa mencakup: 1) hubungan persaudaraan dan keterikatan budaya; 2) aktivitas sehari-hari masyarakat; dan 3) responsivitas pemerintah

terhadap isu SARA. Sementara itu, kerentanan perdamaian mencakup: 1) trauma konflik; 2) ketimpangan ekonomi dan akses politik; 3) isu-isu sensitif yang memicu politisasi identitas; dan 4) mentalitas pragmatis masyarakat. Hambatan yang teridentifikasi dari kapasitas dan kerentanan perdamaian ini adalah pergeseran konflik terbuka ke ketegangan struktural (*conflict latent*), serta tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan ritual *Passaluam* (rekonsiliasi). Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian pasca konflik di Kabupaten Mamasa saat ini berada dalam fase pengelolaan hubungan.

Berdasarkan hambatan dan fase di atas, penulis menguraikan peran Pemerintah Kabupaten Mamasa di era Ramlan dengan menemukan beberapa poin penting. *Pertama*, Ramlan telah proaktif dalam merespons kekhawatiran masyarakat terhadap rasa aman. Ia secara rutin mengidentifikasi masalah yang berkembang dan menggalang perdamaian melalui kegiatan keagamaan. Strateginya terbukti efektif dalam menjaga rasa aman pasca konflik. Bahkan periode kedua kepemimpinannya (2018-2023), Ramlan fokus pada visi keamanan masyarakat dan berkontribusi pada penurunan jumlah tindakan kriminal di Kabupaten Mamasa. *Kedua*, penggunaan forum politik oleh Ramlan untuk menciptakan rasa aman masih memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam membangun kapasitas lembaga adat untuk mendukung kegiatan *Passaluam*. Ada banyak kritik terhadap pendekatan politik Ramlan yang bersifat patronase dan klientelisme, rezimnya bahkan dianggap oleh beberapa pihak sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Penulis menyimpulkan bahwa Ramlan belum sepenuhnya memanfaatkan momentum untuk mendamaikan Keluarga *Massebambangam* dan masyarakat Aralle-Mambi secara menyeluruh. Apalagi karena kinerja Lembaga Adat Kabupaten Mamasa di bawah kepemimpinannya kurang serius dalam memfasilitasi rekonsiliasi di tengah masyarakat. *Ketiga*, Ramlan belum berhasil meningkatkan kapasitas Keluarga *Massebambangam*, menunjukkan bahwa upayanya dalam pembangunan perdamaian berkelanjutan masih kurang memadai. Meskipun Ramlan mengklaim melakukan pembangunan berbasis budaya dan masyarakat, tantangan dari corak politiknya dan rendahnya kapabilitas Keluarga *Massebambangam* menunjukkan kelemahan dalam mengelola konflik dan mendorong perdamaian yang berkelanjutan. Ramlan pada tahap ini tidak berbeda jauh dengan pola intervensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang cenderung formalitas dalam strategi dan pendekatan perdamaiannya pasca konflik.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Mamasa, Organisasi Perdamaian, dan Masyarakat

Berkaca pada kompleksitas persoalan pasca konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, penulis melihat perlunya kepekaan dari Pemkab Mamasa dan pihak ketiga seperti LSM serta organisasi-organisasi perdamaian untuk mengambil inisiatif perdamaian pasca konflik. Inisiatif yang diambil harus mampu mengatasi kelemahan-kelemahan strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel dan Sulbar, serta memperbaiki peran Pemerintah Kabupaten Mamasa di era Ramlan Badawi yang juga belum berhasil menciptakan perdamaian berkelanjutan, melalui peningkatan kapasitas Keluarga *Massebambangam*. Oleh sebab itu, penulis merangkum beberapa syarat dan kemampuan khusus sebagai rekomendasi, bagi ketiga pihak di atas dalam mengambil inisiatif keberlanjutan perdamaian pasca konflik pemekaran Kabupaten Mamasa.

A. Mengetahui Kondisi Lokal

Penulis menekankan pentingnya pemahaman konteks lokal agar pihak-pihak yang memfasilitasi perdamaian dapat berinteraksi secara efektif sesuai kebutuhan, kekhawatiran, dan harapan-harapan dari Keluarga *Massebambangam* dan masyarakat Aralle-Mambi. Salah satu konteks lokal yang penting adalah corak kehidupan kedua komunitas yang pada dasarnya memiliki banyak perbedaan, seperti diuraikan di Bab II penelitian ini. Pemaknaan terhadap identitas yang berbeda, telah mengambil peran besar bagi tindakan kekerasan saat konflik dan ketegangan struktural hubungan kedua kelompok pasca konflik.

B. Mampu Mengajak Semua Pihak Bekerjasama

Pemahaman konteks lokal harus diiringi dengan kemampuan untuk membuat semua pihak di kedua kelompok untuk menyingkirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sebagaimana diketahui kepentingan pribadi dari segelintir elit di Mamasa, telah mendorong konflik pemekaran Kabupaten Mamasa. Oleh karena itu, upaya untuk mempromosikan perdamaian harus dimulai dengan transformasi kesadaran elit lokal, di mana mereka perlu memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Penulis menyadari kesulitan dalam menjalankan strategi ini, namun pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga harus berkolaborasi dalam mengembangkan program ini. Karena bagaimanapun elit lokal di Mamasa dapat didorong untuk berperan sebagai agen perdamaian yang aktif dan konstruktif, serta membantu mendorong transformasi positif menuju masyarakat yang lebih harmonis dan stabil di Kabupaten Mamasa.

C. Mewujudkan Kegiatan Ritus *Passaluam*

Sebagaimana diketahui, ritus *Passaluam* (rekonsiliasi) menjadi harapan dari Keluarga *Massebambangam* dan masyarakat Aralle-Mambi, agar dilakukan dan difasilitasi oleh Lembaga Adat Mamasa. Hal ini merupakan salah satu agenda penting menuju perdamaian berkelanjutan karena sifatnya yang dibutuhkan oleh kedua kelompok. Penulis menekankan agar ritus *Passaluam* yang dilakukan tidak sekedar seremonial belaka, tetapi mampu mentransformasi interaksi sosial dan ikatan antar-kelompok secara menyeluruh. Hal ini dapat dimulai dengan membangun komitmen yang tulus dari mereka yang akan dilibatkan. Sejalan dengan itu, partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelaku kekerasan saat konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, sangat dibutuhkan dalam tahap ini. Pengakuan terbuka, permintaan maaf, serta masing-masing mengambil tanggung jawab atas tindakan kekerasan, menjadi agenda penting untuk dilakukan, agar kedua komunitas dapat kembali saling menerima dan mempercayai.

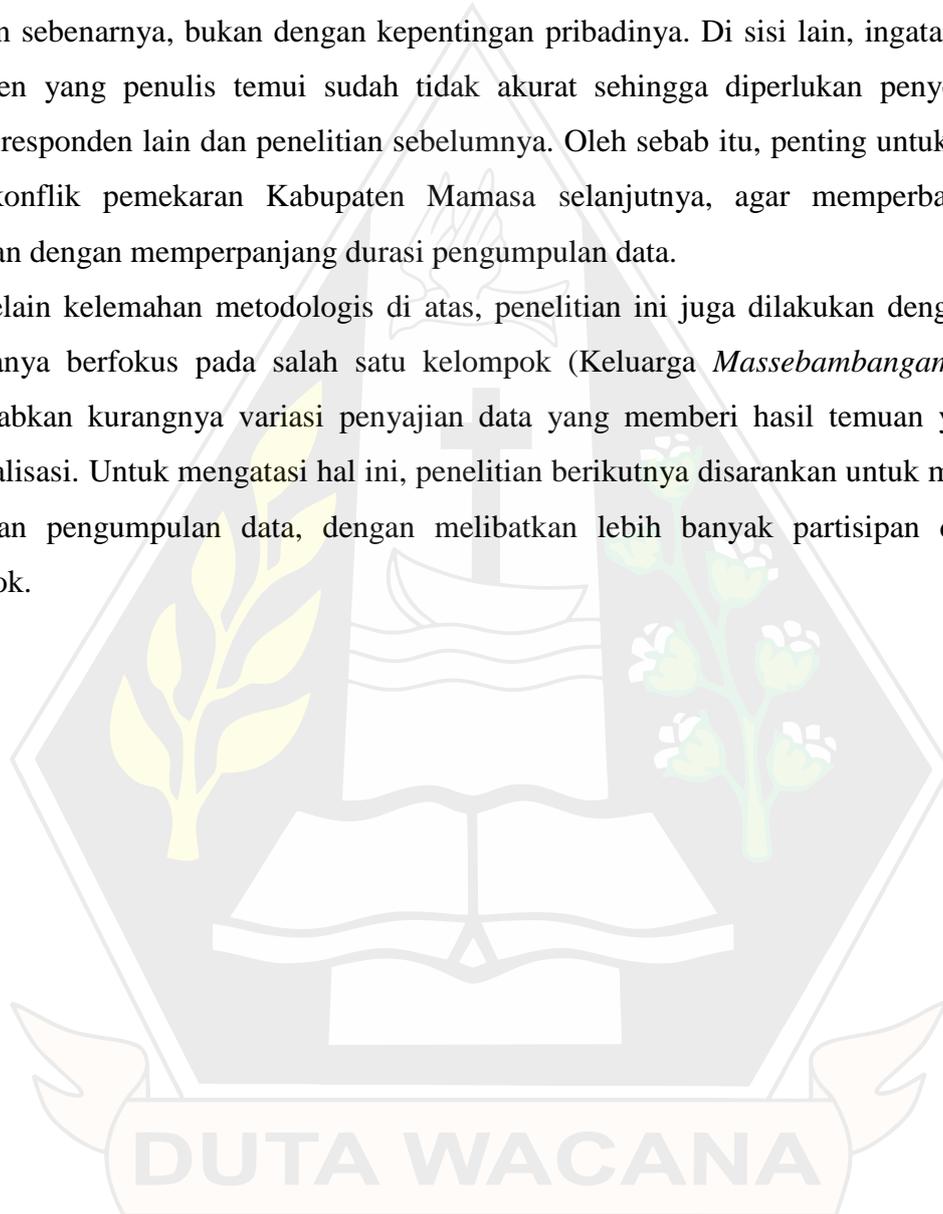
D. Memberdayakan Masyarakat agar Mengambil Inisiatif Perdamaian

Pada akhirnya, inisiatif perdamaian yang datang langsung dari masyarakat non-elit Keluarga *Massebambangam* dan Aralle-Mambi menjadi kunci perdamaian berkelanjutan. Namun demikian, pemberdayaan terlebih dahulu harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Pertama-tama, pemberdayaan harus berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Upaya ini mencakup pelatihan keterampilan usaha kecil-menengah, membantu masyarakat mengakses pasar yang adil, dan pembangunan infrastruktur ekonomi lokal. Selain itu, pemberdayaan harus fokus pada peningkatan pemahaman akan pentingnya kerjasama antar-kelompok. Program-program seperti dialog dan forum diskusi bersama, akan sangat membantu dalam membangun hubungan yang saling mengerti dan percaya. Terakhir, pemberdayaan yang dilakukan harus mengikutkan pendidikan politik. Mulai dari pemahaman tentang proses pengambilan keputusan politik hingga mengajarkan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan penyelesaian konflik secara damai. Penulis menyadari bahwa kemampuan untuk menjalankan program ini akan sangat bergantung pada alokasi sumber daya pendanaan dan pelatihan. Namun hal ini harus dilakukan agar perdamaian berlangsung efektif dalam jangka panjang, melalui kemandirian dan pemahaman tentang kerjasama yang didorong oleh masyarakat non-elit Keluarga *Massebambangam* dan Aralle-Mambi.

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya

Penulis menyadari berbagai kelemahan, seperti penyajian data hingga metode analisis dalam penelitian ini. Kekurangan-kekurangan ini membuat penulis tidak mengeksplor temuan di lapangan dengan mendalam. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan waktu saat penulis melakukan penelitian. Penulis di satu sisi harus selektif dalam memilih waktu penelitian, karena penelitian yang bertepatan dengan tahun politik (Pemilu 2024). Hal ini penulis lakukan agar responden dapat memberikan data, yang sesuai dengan keadaan di lapangan sebenarnya, bukan dengan kepentingan pribadinya. Di sisi lain, ingatan beberapa responden yang penulis temui sudah tidak akurat sehingga diperlukan penyempurnaan melalui responden lain dan penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, penting untuk penelitian pasca konflik pemekaran Kabupaten Mamasa selanjutnya, agar memperbaiki desain penelitian dengan memperpanjang durasi pengumpulan data.

Selain kelemahan metodologis di atas, penelitian ini juga dilakukan dengan penulis yang hanya berfokus pada salah satu kelompok (Keluarga *Massebambangam*). Hal ini menyebabkan kurangnya variasi penyajian data yang memberi hasil temuan yang dapat digeneralisasi. Untuk mengatasi hal ini, penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas jangkauan pengumpulan data, dengan melibatkan lebih banyak partisipan dari kedua kelompok.



Daftar Pustaka

- AAS.P, Taufik, dan Andi Waris Tala, ed. Drs. H. Ramlan Badawi, MH: Harapan Masyarakat Mamasa Untuk Mandiri Dalam Kehidupan Berkeadilan, Demokratis Dan Sejahtera. Sebuah Bunga Rampai; Penulis Drs. H. Ramlan Badawi, MH. Kabupaten Mamasa: Aliansi Wartawan Mamasa (Alwama), 2016.
- Aditjondro, George Junus. "Terlalu Bugis Sentris, Kurang 'Perancis'." Jakarta, 2006.
- Allo, Alberth. Sejarah Perjuangan Rakyat Mamasa Melawan Gerombolan DI/TII Dan Pasukan Bn 710 (1950-1965). Mamasa: Gereja Toraja Mamasa, 2016.
- Amir, Muhammad. Penataan Mandar Masa Kolonial Belanda 1905-1942. Makassar: Penerbit Arus Timur, 2016.
- "Anwar Adnan Saleh." Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 20 Desember 2023. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anwar_Adnan_Saleh&oldid=25034956.
- Ardiansyah, Ardiansyah. "Tagih Janji PJ Bupati Mamasa, Puluhan Nakes Kembali Gelar Aksi Demo | BPK Perwakilan Provinsi SULAWESI BARAT," 31 Oktober 2023. <https://sulbar.bpk.go.id/tagih-janji-pj-bupati-mamasa-puluhan-nakes-kembali-gelar-aksi-demo/>.
- Arnomiati. "Konflik Mengintegrasikan Masyarakat Aralle, Tabulahan, dan Mambi di Kabupaten Mamasa." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar, 2012.
- Arraiyah, Hamdar, dan H. Nahar Nahrawi. "Menuju Damai dengan Kearifan Baru (Studi Kasus Pasca Konflik Di Aralle, Tabulahan dan Mambi)." Al-Qalam 11, no. 2 (2005): 26. <https://doi.org/10.31969/alq.v11i2.588>.
- Asgart, Sofian Munawar. "Monograf Kabupaten Mamasa, narrative report." Narrative report. Hivos-Yayasan Interseksi, 2015. https://www.academia.edu/15627930/Monograf_Kabupaten_Mamasa.
- BPS Kabupaten Mamasa, Badan Pusat Statistik. "Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamasa Tahun 2023," 2023.
- . "Kabupaten Mamasa dalam Angka 2019," 2019.
- . "Kabupaten Mamasa dalam Angka 2024," 2024.
- . "Kecamatan Aralle Dalam Angka 2023," 2023.
- . "Kecamatan Bambang Dalam Angka 2023," 2023.
- . "Kecamatan Buntu Malangka' Dalam Angka 2023," 2023.
- . "Kecamatan Mambi Dalam Angka 2023," 2023.
- . "Kecamatan Mehalaan Dalam Angka 2023," 2023.
- . "Kecamatan Rantebulahan Timur dalam Angka 2023," 2023.
- . "Kecamatan Tabulahan Dalam Angka 2023," 2023.
- . "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mamasa Menurut Lapangan Usaha 2018-2022," 2023.
- . "Statistik Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2023," 2023.

Budiharjo. "Perlawanan Rakyat Tabulahan dan Bambang Menentang Kehadiran Belanda di Pitu Ulunna Salu (1908)." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar, 2015.

"Bupati Mamasa Resmikan 38 Paket Kegiatan Dana PEN TA 2022 Senilai Rp 93 M – Rakyatta.co." Diakses 29 Maret 2024. <https://rakyatta.co/bupati-mamasa-resmikan-38-paket-kegiatan-dana-pen-ta-2022-senilai-rp-93-m/>.

Busran, Abdul Latief, dan Rezki Aziz. "Peran Organisasi Pertahanan Rakyat Pitu Ulunna Salu dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Ancaman DI/TII Tahun 1958." *Journal Pegguruang: Conference Series* 4, no. 1 (1 Mei 2022): 336–40.

Crisis Group, International. "Decentralisation and Conflict in Indonesia: The Mamasa Case." *Singapore/Brussels, Asia Briefing No 37*, 3 Mei 2005.

"Data Peserta Didik Kab. Mamasa - Dapodikdasmn." Diakses 15 Maret 2024. <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/2/330400>.

"Data Sekolah - Pauddikdasmn." Diakses 15 Maret 2024. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/330400>.

Deppalange, Daen Manala. "Kemampuan Ramlan Badawi dalam Memenangkan Pilkada di Kabupaten Mamasa Tahun 2013." *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2016.

detiksulsel. "Tenaga Honorer Pemkab Mamasa Unjuk Rasa karena Setahun Belum Terima Gaji," 18 September 2023. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6937409/tenaga-honorer-pemkab-mamasa-unjuk-rasa-karena-setahun-belum-terima-gaji>.

"Dosen – Departemen Sosiologi." Diakses 15 Juni 2024. <https://sosiologi.fisipol.ugm.ac.id/dosen/>.

Fawaid, Ahmad, dan Rianayati. K Pancasari, trans. oleh. RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran; Jhon W. Creshwell. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Gubernur Sulawesi Barat. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (2014).

Hakim, Budianto. "Jejak Austronesia Di Mamasa, Sulawesi Barat: Kajian Tradisi Tutur, Etnografi, Dan Arkeologis." *WALENNAE: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan Dan Tenggara* 11, no. 1 (2009): 1–16. <https://doi.org/10.24832/wln.v11i1.200>.

Hidayat, Ferdy. "Berteologi Publik Terhadap Ekonomi dan Ekologi Studi Kasus: Penolakan Rencana Tambang LTJ oleh Masyarakat Salutambun di Kabupaten Mamasa." *Loko Kada Tuo Jurnal Teologi Kontekstual & Oikumenis* 1, no. 1 (2024): 1–21.

———. "Eksistensi Paondo sebagai Model Pengajaran bagi Penghayat Ada' Mappurondo di Desa Ranteberang, Kabupaten Mamasa." *Pusaka: Jurnal Khaazanah Keagamaan* 11, no. 2 (2023): 245–60.

Inews.Polman. "Breaking News : Gaji Tak Dibayarkan, Ratusan Aparat Desa di Mamasa Demo Pemda," 15 Januari 2024. <https://polman.inews.id/read/394864/breaking-news-gaji-tak-dibayarkan-ratusan-aparat-desa-di-mamasa-demo-pemda>.

"Inilah Daftar Bupati Mamasa Sulawesi Barat, Nomor 3 Paling Lama - Halaman 3." Diakses 20 November 2023. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3117102828/inilah-daftar-bupati-mamasa-sulawesi-barat-nomor-3-paling-lama?page=3>.

J. Campbell, Philip. "Pitu Ulunna Salu." Dalam Sulawesi Phonogies (Workpapers in Indonesian Languages and Cultures Vol. 12). Rene van den Berg (ed). Ujung Pandang: The Summer Institute of Linguistics in Cooperation with The Department of Education and Culture., 1991.

J. Strómme, Kare. "UNHAS-SIL Sociolinguistic Survey: Kabupaten Polewali Mamasa, West Central Section" dalam Timothy Friberg, (ed), South Sulawesi Sociolinguistic Surveys 1983-1987 (Workpapers in Indonesian Languages and Culture, Vol.5). Jayapura: Percetakan Universitas Cenderawasih, 1987.

Jeong, Ho-Won. Peacebuilding In Postconflict Societies: Strategy and Process. London: Lynne Rienner Publishers, 2005.

JPPN.com. "PTUN Kuatkan SK Mendagri, Ramlan Kuku jadi Bupati Mamasa," 2012. <https://www.jpnn.com/news/ptun-kuatkan-sk-mendagri-ramlan-kuku-jadi-bupati-mamasa>.

"KABUPATEN MAMASA - GIS Madrasah." Diakses 15 Maret 2024. <https://madrasah.kemenag.go.id/gis/home/index/76/7603#>.

Kambo, Gustiana. Politik Identitas Etnik: Sebuah Kajian Konstruktivis dalam Tradisi Interaksi Simbolik. I. Makassar: Unhas Press, 2021.

Khalid, Idham, dan Saprillah. Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat: Sulawesi Barat. Dinas Pendidikan Nasional, 2010.

Klis, W.A. van der. Datanglah Kerajaan-Mu: Lima puluh tahun pekabaran Injil di Toraja Barat 1913-1963. Rantepao: PT. Sulo, 2007.

Lederach, John Paul. Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington, D.C: Institute for Peace, 1997.

Limbong Lola, Dra. Emiaty. "Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan." Sistim Upacara Keagamaan di Kecamatan Mamasa Dati II Polmas. Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997 1996.

Liputan6.com. "Mengakhiri Konflik, Mamasa Akan Dipecah." liputan6.com, 21 Oktober 2004. <https://www.liputan6.com/news/read/88351/mengakhiri-konflik-mamasa-akan-dipecah>.

M. George, Kenneth. Showing Signs of Violence: The Cultural Politics of a Twentieth-Century Headhunting Ritual. Berkeley: University of California Press, 1996.

Madarhakad. "Studi Komparasi Falsafah Ada' Tuo Tentang Pelanggaran dan Pengampunan dengan Teori Restorative Justice Menurut Howard Zehr." Tesis Pascasarjana, Universitas Kristen Duta Wacana, 2013.

"Mamasa-Mambi Agak Tenang - News Liputan6.com," 2004. <https://www.liputan6.com/news/read/83268/mamasa-mambi-agak-tenang>.

Mandadung, Arianus. Keunikan Budaya Pitu Ulunna Salu Kondosapata Mamasa. Pertama. Mamasa: Pemerintah Kabupaten Mamasa, 2005.

- Mansi, La. "Sage Advice Sengo-Sengo In The District Mambi Mamasa." *Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar* 1, no. 1 (Mei 2013): 117–29.
- Maryanah, Tabah. "Governance dalam Manajemen Konflik Pemekaran Kabupaten Mamasa." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 4, no. 1 (2013).
- Masao, Yamaguchi. "Penelusuran Bahasa Pitu Ulunna Salu: Kedudukannya dalam Penelitian Bahasa di Sulawesi Selatan." *Analisis Tahun III, No 5*, 2002.
- McKenzie, Robin. "Aralle-Tabulahan." Dalam *Sulawesi Phonogies (Workpapers in Indonesian Languages and Cultures Vol. 12)*. Rene van den Berg (ed). Ujung Pandang: The Summer Institute of Linguistics in Cooperation with The Department of Education and Culture., 1991.
- Morrell, Elizabeth. "Desentralisasi atau Separasi? Suatu Tinjauan dari Sulawesi Selatan." *Antropologi Indonesia* 0, no. 68 (2002). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i68.3434>.
- Natalia D, Kristin. "Peranan Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Balla Barat Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2019): 15–20.
- Nurafiat, Arif. "ALLAMUNGAN BATU DI LUYO (Kajian History Bentuk Persatuan Kerajaan-Kerajaan Mandar Abad ke XVI-XVII)." *Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alaudin Makassar*, 2021.
- Oesman, M.Hum, Ir. Osrifoel, ed. *Aksitektur Tradisional Daerah Mamasa*. Penulis: Ansaar,SH. Jakarta: Direktorat Tradisi, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011.
- Pena Sulbar. "Sikapi Pembunuhan di Aralle, Bupati Mamasa Gelar Rapat Bersama Forkopimda dan Tokoh Masyarakat," 23 Agustus 2022. <https://penasulbar.co.id/sikapi-pembunuhan-di-aralle-bupati-mamasa-gelar-rapat-bersama-forkopimda-dan-tokoh-masyarakat/>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (2019).
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Adat (2017).
- "Pertemuan Tokoh-tokoh Masyarakat PUS (7 Kecamatan). Difasilitasi oleh Bupati Mamasa di Lantang Kada Nene Mambi Terkait Kasus Pembunuhan Aralle," 20 Agustus 2023. https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v&ref=watch_permalink&v=1258333684867778.
- "Polisi Kesulitan Cari Bukti Tambahan, Tersangka S Kasus Pembunuhan Pasutri Aralle Wajib Lapor - MEDIA INDIGO99.com." Diakses 15 Juni 2024. <https://indigo99.com/polisi-kesulitan-cari-bukti-tambahan-tersangka-s-kasus-pembunuhan-pasutri-aralle-wajib-lapor/>.
- Rakya'ta.co. "Sejarah, Bupati Mamasa Berkunjung Ke Kantor BPMS GTM, Ini Tujuannya," 23 September 2019. <https://rakyatta.co/sejarah-bupati-mamasa-berkunjung-ke-kantor-bpms-gtm-ini-tujuannya/>.
- Redaksi. "Hasil Visum, Kapolres Mamasa Pastikan Pasutri di Aralle Tewas Dibunuh." *Journal Investigasi (blog)*, 8 Agustus 2022. <https://www.journalinvestigasi.com/berita/hasil-visum-kapolres-mamasa-pastikan-pasutri-di-aralle-tewas-dibunuh/>.

ResearchGate. "Ho-Won Jeong's Research Works." Diakses 26 April 2024.

<https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Ho-Won-Jeong-2112027957>.

Rinoza, Renal, dan Risman Buamona. *Bumi dan Manusia Mamasa: Sebuah Ihwal tentang Perubahan Sosial-Ekologi di Dataran Tinggi Sulawesi*. TAB Grafika Yogyakarta: TANAH AIR BETA bekerjasama dengan Tim Kaji Tindak Malabar 22 dan Sajogyo Institute, 2019.

Rosa, Enni. "Sebuah Catatan Perjumpaan Ada' Mappurondo, Islam, dan Kristen dalam Tradisi Pambayaan Ku'bu' di Jemaat Sepang." *Tepiam: Jurnal Misiologi dan Komunikasi Kristen* 1, no. 1 (2021): 1–15.

Rusandi dan Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (17 Juni 2021): 48–60.

<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

"Rusuh Mamasa, ATM akan Dipersiapkan Jadi Kabupaten." Diakses 28 September 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-227822/rusuh-mamasa-atm-akan-dipersiapkan-jadi-kabupaten->

Sahuding, Sarman. *PUS & PBB dalam Imperium Sejarah*. Makassar: Nurimuri Transmedia, 2008.

Stepanus, Izak Y.M. Lattu, dan Tony Tampake. "Ritual, Ruang Bersama, dan Rekonsiliasi Masyarakat Lokal di Mamasa, Sulawesi Barat." *Religió: Jurnal Studi Agama-agama* 9, no. 2 (2019).

Subhan, SD, Muhammad. *Politik, Identitas, dan Konflik : Dinamika dan Resolusi Konflik Pemekaran di Mamasa; Penyunting, Try Harijono*. Jakarta: Palmerah Syndicate, 2023.

———. "Rivalry of the Elites in Ethno-Religious Conflicts: Dynamics of Conflict Arising from Territorial Split of Mamasa." *International Journal of Business and Social Science* 9, no. 11 (2018).

<https://doi.org/10.30845/ijbss.v9n11p5>.

Suryaman, Aan. "Birokrasi dan Kepemimpinan Politik Ramlan Badawi di Kabupaten Mamasa." *Skripsi, Dapertemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Hasanuddin*, 2022.

Susan, Novri. "Peran Pranata Adat dalam Pencegahan dan Penghentian Konflik Antara Kelompok Masyarakat. Diketahui Oleh Novri Susan, Ph. D." *Laporan Pengkajian Hukum*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014.

"Target Tahun Ini Ruas Jalan Mambi-Malabo Selesai, Tidak Becek Lagi Warga: Terima Kasih Presiden." Diakses 29 Maret 2024. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/4388-target-tahun-ini-ruas-jalan-mambi-malabo-selesai-tidak-becek-lagi-warga-terima-kasih-presiden>.

Transtipo. "Pemkab Mamasa Defisit Rp200 M, 150 Orang Demo di KPK RI." *TRANSTIPO (blog)*, 18 Agustus 2023. <https://www.transtipo.com/pemkab-mamasa-defisit-rp200-m-150-orang-demo-di-kpk-ri/>.

Tribun-sulbar.com. "ALASAN Polda Sulbar Tetapkan S Sebagai Tersangka Tunggal Kasus Pembunuhan Pasutri di Aralle Mamasa," 28 Agustus 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/08/28/alasan-polda-sulbar-tetapkan-s-sebagai-tersangka-tunggal-kasus-pembunuhan-pasutri-di-aralle-mamasa>.

Trijono, Lambang. "Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13, no. 1 (Juli 2009): 48–70.

———. Pembangunan Sebagai Perdamaian. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

“Visualisasi Data Kependudukan.” Diakses 3 Desember 2022.

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.

Wawancara dengan DM, 4 April 2024.

Wawancara dengan E, 3 Mei 2024.

Wawancara dengan Madarhakad, 3 April 2024.

Wawancara dengan MT, 4 April 2024.

Wawancara dengan O, 1 April 2024.

Wawancara dengan Ramlan Badawi, 6 April 2024.

